

**KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN
DALAM MENUMBUHKAN KEDISIPLINAN PESERTA
DIDIK DI MIN 3 PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

DWI RAHMAWATI
NIM. 203200031

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Rahmawati, Dwi. 2024. *Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo.* **Skripsi,** Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pembimbing: Mukhlison Effendi, M.Ag.

Kata Kunci: sistem poin, pelanggaran, kedisiplinan

Kedisiplinan sangat penting dimiliki oleh siswa dalam mematuhi peraturan sekolah. Dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa, sekolah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin pelanggaran merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Penerapan sistem poin mampu mengontrol perilaku siswa dalam menumbuhkan kedisiplinan di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo, (2) mendeskripsikan hasil penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo, dan (3) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) pihak sekolah mendukung penerapan sistem poin pelanggaran dengan memberikan contoh yang baik, melakukan kegiatan yang positif seperti pembiasaan membaca dan menghafal surat-surat pendek, do'a-do'a, asmaul husna, dan sholat berjamaah (2) peraturan sistem poin pelanggaran sangat efektif mendisiplinkan siswa serta mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dengan memberikan hukuman/konsekuensi dan penghargaan untuk mengontrol perilaku siswa, supaya mereka menyadari bahwa tindakan positif yang mereka lakukan akan dihargai, sedangkan pelanggaran yang mereka lakukan akan mendapatkan suatu konsekuensi. (3) dukungan dari seluruh warga sekolah dan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem poin pelanggaran ini dalam mendisiplinkan siswa terutama kepada bapak ibu guru untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan konsisten membimbing dan mengingatkan seluruh siswa untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada di sekolah.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwi Rahmawati
NIM : 203200031
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Judul : Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan
Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing,

Mukhlison Effendi, M.Ag.
NIP. 197104302000031002

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Ulum Fatmahanik, M.Pd.
NIP. 198512032015032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Dwi Rahmawati
NIM : 203200031
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Judul : Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan
Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Ulum Fatmahanik, M.Pd.
Penguji I : Farida Yufarlina Rosita, M.Pd.
Penguji II : Mukhlison Effendi, M.Ag.

()
()
()

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rahmawati
NIM : 203200031
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Judul Skripsi/Tesis : Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2024

Penulis,



Dwi Rahmawati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rahmawati

NIM : 203200031

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul Skripsi : Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dwi Rahmawati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Pendidikan adalah suatu usaha yang dilatarbelakangi pada kenyataan permasalahan yang berkembang pada saat ini, seperti kurangnya toleransi serta minimnya nilai-nilai Pancasila, perubahan moral di kehidupan bernegara, hilangnya kesadaran dalam berbudaya nasional, serta melemahnya kemandirian bangsa.²

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur terpenting untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk membentuk karakter serta kepribadian siswa. Sekolah menjadi tempat terjadinya proses pendidikan sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Akan tetapi, dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai komponen masyarakat. Salah satu

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003”, No. 20 (2003).

² Mutiara Shinta dan Siti Quratul Ain, “Strategi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2021): 4046.

masalah tersebut menurunnya etika moral dalam praktik kehidupan sekolah yang menimbulkan sejumlah perilaku negatif yang merisaukan. Penyebab menurunnya etika moral dalam praktik kehidupan sekolah yaitu kurangnya kesadaran para siswa dalam mentaati peraturan tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan rambu-rambu untuk siswa dalam proses melaksanakan kehidupan sebagai warga sekolah.³

Sekolah selaku lembaga pendidikan memiliki kebijakan tertentu berupa bentuk aturan. Bentuk dari aturan sekolah biasa disebut dengan tata tertib sekolah. Dalam tata tertib sekolah, siswa dituntut untuk selalu menaati peraturan tata tertib sekolah agar proses keberhasilan belajar mengajar mampu membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan yang diterapkan sekolah sangat penting untuk mendidik kedisiplinan yang berperan mempengaruhi, mengubah, mengendalikan, membentuk, dan membina perilaku siswa agar tepat dengan nilai-nilai yang ditanamkan.⁴ Salah satu cara yang tepat dalam meminimalisasi pelanggaran sekolah adalah dengan diterapkannya sistem poin pelanggaran di sekolah. Dalam menerapkan sistem poin setiap sekolah pasti mempunyai mekanisme kebijakan yang berbeda-beda.⁵

³ Tri Lilin Natalia Zendrato dan Berkat Persada Lase, “Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah,” *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 125.

⁴ Aditya Kristian, “Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2022), 2.

⁵ Ilyatus Sholihah, “Pengembangan Budaya Madrasah Untuk Peningkatan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Putri Ganjaran Gondanglegi Malang,” 2022, 4.

Tata tertib sistem poin adalah suatu tatanan, peraturan, undang-undang atau hukum dengan berbentuk butir (nilai) yang dapat dijadikan dasar atau kegiatan dari suatu organisasi atau lembaga tertentu.⁶ Sistem poin pelanggaran merupakan salah satu sistem yang cukup efisien untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah. Kelebihan sistem poin ini antara lain bisa menaggulangi tindak kekerasan yang mungkin terjadi di sekolah. Tidak hanya itu, terjalinnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam mengawasi anaknya di sekolah agar tidak melakukan pelanggaran menjadi kelebihan lain dari penerapan sistem poin ini. Sistem poin yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif untuk para siswa. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem poin ini, siswa bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku di sekolah. Siswa hendak berpikir kembali untuk melaksanakan kesalahan ataupun pelanggaran pada tata tertib sekolah.⁷

Penanaman nilai kedisiplinan menjadi sangat penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan oleh sekolah, mengingat kalangan siswa menjadi generasi penerus masa depan bangsa. Salah satu faktor kesuksesan diri siswa pada masa yang akan datang berkaitan dengan disiplin yang dilakukan secara ketat dan tertib. Sekolah telah membentuk berbagai macam peraturan dan tata tertib agar kalangan siswa dapat menjalankan proses pembelajaran dengan disiplin.⁸

⁶ I Wayan Darna, *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah Dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa* (Bandung: Nilacakra, 2023), 78.

⁷ Dwi Setyawan, Ely Setyo Astuti, dan Ekojono Ekojono, "Sistem Pencatatan Poin Pelanggaran Siswa Pada Sma Negeri 1 Purwosari," *Jurnal Informatika Polinema* 1, no. 1 (2017): 13.

⁸ Nicholas Mamonto, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, *Disiplin Dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 19.

Disiplin adalah kepentingan orang itu sendiri. Karena tiap-tiap orang ingin mencapai tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi dalam hidupnya untuk mengembangkan harga diri yang lebih kuat. Pencapaian itu menimbulkan kepuasan batin bagi tiap orang yang normal. Sehingga, jika seseorang itu normal, maka segala daya upaya untuk mewujudkan disiplin dalam dirinya, akan dilakukan dengan optimal hingga mencapai tingkat kesempurnaan.⁹ Kedisiplinan adalah kualitas inti dari tanggung jawab pribadi. Kedisiplinan diri terlihat melalui kerapian, ketepatan waktu, sikap hemat, dan lain-lain. Kedisiplinan memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang mereka tahu, mereka harus lakukan, dan di mana mereka menginginkan itu atau tidak. Hal tersebut didasarkan pada penerimaan mereka akan tanggung jawab pribadi mereka dan setiap aspek dalam hidupnya. Kedisiplinan memampukan seseorang untuk berkonsentrasi dalam mencapai tujuan, baik di bidang pendidikan, olahraga, musik, bisnis, atau hubungan antar pribadi. Walaupun tanpa penyemangat dari luar atau larangan-larangan, seorang yang disiplin dapat mengatasi kelemahannya, dan berkembang menjadi kekuatan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menentukan MIN 3 Ponorogo sebagai tempat penelitian. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti Madrasah Ibtida'iyah di Ponorogo yang sudah menerapkan sistem poin pelanggaran dengan baik adalah MIN 3 Ponorogo. Biasanya tata tertib sistem poin masih diterapkan di lingkup jenjang MTs/SMP dan MA/SMA, namun madrasah

⁹ Hadziq Jauhary, *Hidup Sukses Dengan Disiplin* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 42.

¹⁰ John Garmo, *Pengembangan Karakter Untuk Anak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2013), 45.

ini sudah menerapkan kebijakan tersebut mulai dari kelas I MI. MIN 3 Ponorogo menerapkan kebijakan sistem poin guna menumbuhkan kedisiplinan para siswa. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at, 6 Oktober 2023 dengan Bapak Sufyan Alimudin selaku Waka Kesiswaan, ditunjukkan bahwa kebijakan penerapan sistem poin di MIN 3 Ponorogo sudah berjalan sekitar 3 tahun. Hal tersebut dikarenakan banyak siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Pada akhirnya MIN 3 Ponorogo membuat kebijakan berupa tata tertib sistem poin untuk mencatat poin pelanggaran bagi siswa yang melanggar peraturan serta diberikan sanksi non fisik agar siswa tidak mengulangi lagi perbuatan yang seharusnya tidak dilanggar. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan siswa yaitu siswa datang terlambat ke sekolah, pada saat pembelajaran di kelas siswa sering tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, makan dan minum dengan berdiri, siswa berkelahi dengan kelas lain, dan pada saat upacara bendera beberapa siswa masih dengan atribut seragam yang tidak lengkap. Kondisi seperti ini membuat pihak sekolah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran guna meningkatkan kedisiplinan siswa untuk mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah.¹¹

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peraturan yang diterapkan dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik di MIN 3 Ponorogo. Peneliti menarik judul mengenai **“Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik di MIN 3 Ponorogo”**.

¹¹ Sufyan Alimudin, Hasil Wawancara dengan Waka Kesiswaan MIN 3 Ponorogo, 6 Oktober 2023.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut.

1. Aspek yang diteliti yaitu mengetahui kebijakan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik.
2. Hasil dari penerapan sistem poin pelanggaran terhadap kedisiplinan peserta didik.
3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik.
4. Peserta didik yang diteliti pada penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MIN 3 Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo?
2. Bagaimana hasil dari penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan hasil dari penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi untuk memperkaya proses kedisiplinan siswa di sekolah. Khususnya dalam menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik di MIN 3 Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Siswa

Bagi siswa dengan adanya penerapan sistem poin yang diterapkan di sekolah diharapkan mampu memotivasi siswa untuk berperilaku baik. Siswa mampu disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah dengan sebaik mungkin.

b. Bagi Sekolah

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin bagi pihak sekolah. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam menentukan strategi peningkatan kedisiplinan siswa terhadap pengembangan sikap sosial.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam proses melaksanakan penelitian di sekolah. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi dalam bidang pendidikan dengan segala permasalahan yang ada di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memperoleh hasil paparan dari penelitian yang mudah dibaca dan dimengerti dalam penelitian skripsi yang telah dilakukan. Peneliti menyusun perencanaan laporan penelitian dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan, dimana pada bab ini berfungsi memberikan gambaran umum sebagai pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

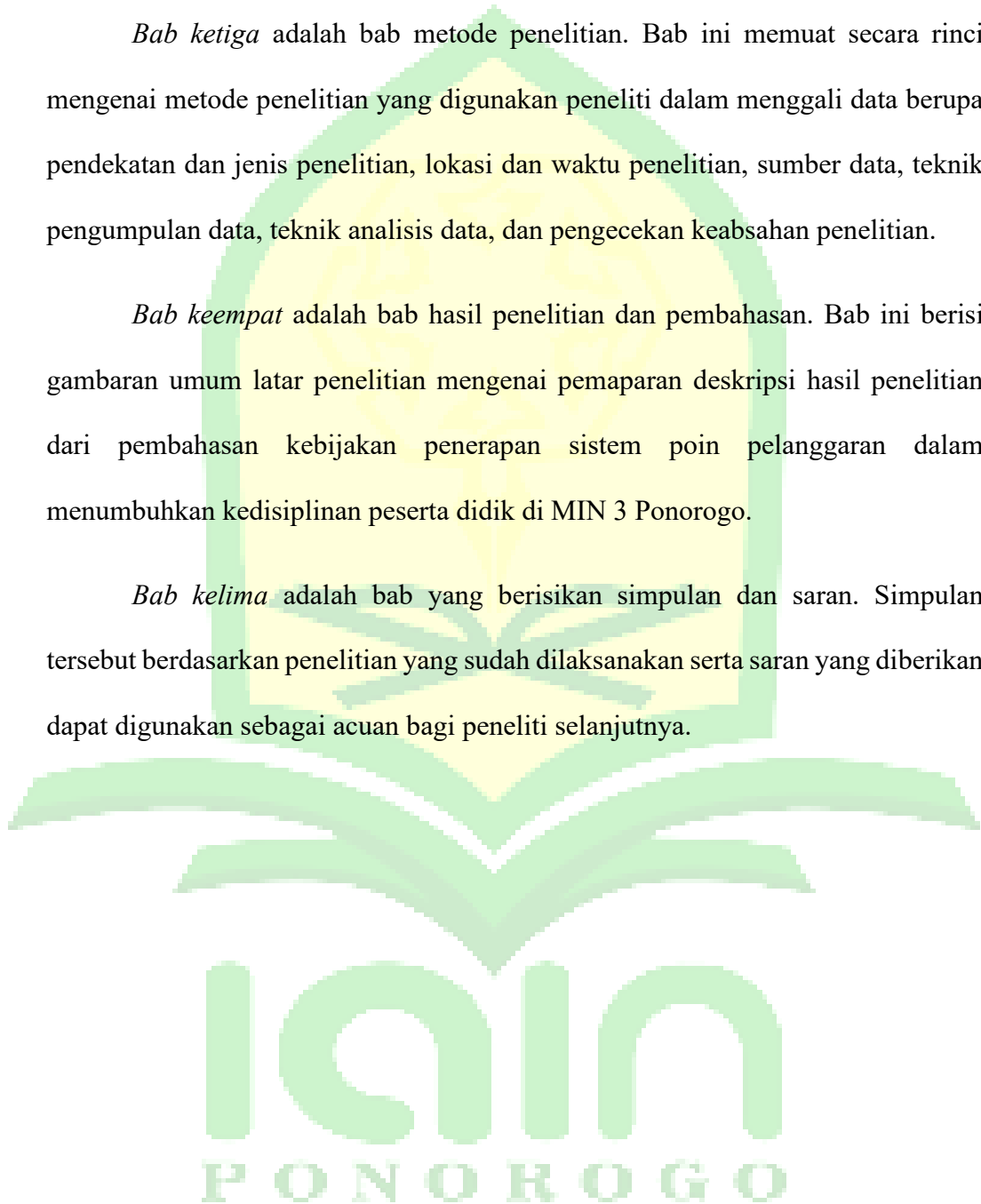
Bab kedua adalah bab kajian pustaka. Pada bab ini berfungsi memberikan uraian tentang kajian teori yang digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya pada

bab ini termuat kajian penelitian terdahulu, dan kerangka pikir terkait dengan tema penelitian.

Bab ketiga adalah bab metode penelitian. Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menggali data berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan penelitian.

Bab keempat adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum latar penelitian mengenai pemaparan deskripsi hasil penelitian dari pembahasan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik di MIN 3 Ponorogo.

Bab kelima adalah bab yang berisikan simpulan dan saran. Simpulan tersebut berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan serta saran yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber teori yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Sistem Poin

a. Pengertian Kebijakan

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai: 1) suatu penggarisan ketentuan-ketentuan, 2) kebijakan bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kepastian dalam maksud, cara dan atau sarana, 3) kebijakan digunakan bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan bersama.¹

¹ H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

Menurut Eko Handoyo, kebijakan adalah rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Selanjutnya, kebijakan dalam arti spesifik yaitu kebijakan berkaitan dengan cara atau alat dan tujuan yang difokuskan dalam seleksi tujuan serta sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.²

Aspek bentuk kebijakan yang tertera dalam buku catatan tata tertib sekolah meliputi kelakuan, kerajinan dan kerapian. Kebijakan yang dijalankan pihak sekolah dijalankan dalam sanksi pelanggaran yang mampu dilihat berdasarkan bobot poin pelanggaran selama satu tahun yang bisa dihitung secara kumulatif dicatat oleh wali kelas yang bersangkutan serta dilanjutkan kepada pihak wali kelas berikutnya. Jika skor poin memenuhi jumlah yang ditentukan siswa akan diproses sebagaimana kebijakan yang sudah diberlakukan selama menjadi siswa.³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan sistem poin ini diterapkan oleh sekolah serta dijalankan dalam bentuk sanksi pelanggaran yang dicatat berupa skor angka sebagai acuan untuk memberikan peringatan dalam mendisiplinkan seluruh siswa. Kebijakan ini dijalankan dengan

² Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 5.

³ Ipnu Wuldanari, "Penerapan Program Sistem Poin Di SMK Negeri 2 Yogyakarta," *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 124.

pemberian sanksi non fisik sesuai dengan bobot poin pelanggaran yang didapatkan oleh siswa.

b. Pengertian Sistem Poin

Sistem poin hukuman adalah salah satu bentuk penguatan negatif yang diberikan sekolah kepada siswa yang melanggar peraturan.⁴ Penguatan negatif yaitu dengan memberikan penguatan untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang dipandang negatif atau kurang tepat.⁵

Penguatan negatif bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satu upaya dengan cara diterapkannya sistem poin pelanggaran di sekolah.⁶ Menurut I Wayan Darna, tata tertib sistem poin adalah suatu tatanan, peraturan, undang-undang atau hukum dengan berbentuk butir (nilai) yang dapat dijadikan dasar atau kegiatan dari suatu organisasi atau lembaga tertentu.⁷

Menurut Erwin Susanto, sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai

⁴ Irlan, Rohiat, dan Puspa Djuwita, "Poin Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Siswa SMA," *Manajer Pendidikan* 11, no. 4 (2017): 370.

⁵ Mohammad Surya, *Psikologi Konseling* (Jakarta: C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003), 113.

⁶ Uly Inayati Taqiyya, "Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa Pada SMAN 1 Jekulo Kudus" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 73.

⁷ I Wayan Darna, *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah Dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa*, (Bandung: Nilacakra, 2023), 78.

dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran. Pemberian poin yang diberikan beragam, bergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Tujuan sistem poin ini adalah untuk membuat peserta didik menjadi lebih rajin pada kegiatan sekolah dan agar siswa taat pada aturan dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah.⁸

Menurut Husni Mubarak dkk, sistem poin merupakan bentuk pengendalian sosial yang represif, karena sistem poin dilaksanakan setelah terjadinya perilaku menyimpang atau pelanggaran. Sanksi berupa peringatan dan poin atas pelanggaran, poin yang diberikan tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Keberadaan sistem poin memegang peranan yang sangat penting, sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah menuju kedisiplinan yang lebih besar. Karena peraturan memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa dan berfungsi sebagai pengontrol tingkah laku siswa, maka peraturan sekolah secara tidak langsung membawa siswa pada keadaan belajar yang baik dan tertib di sekolah, sehingga peraturan sekolah berkaitan erat dengan pembelajaran siswa di sekolah.⁹

Setiap ada siswa yang kurang tertib atau melakukan pelanggaran pada tata tertib harus dicatat pada buku catatan tata tertib siswa. Sistem poin

⁸ Erwin Susanto, "Menejemen Sistem Poin Dalam Membina Kedisiplinan Siswa," *Manajer Pendidikan* 9, no. 3 (2015): 371.

⁹ Husni Mubarak et al., "Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Pelanggaran Siswa SD Al Ma'soem Bandung," *Pedagogia: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 3 (2021): 131.

merupakan suatu kebijakan sekolah yang dibuat berdasarkan musyawarah dalam berbagai pihak, seperti kepala sekolah, perwakilan guru serta tim pengembang dari sekolah.¹⁰

Jadi, dapat disimpulkan sistem poin adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh sekolah dengan cara memberikan skor poin kepada siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Siswa akan mendapatkan jumlah poin dan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sistem poin berfungsi sebagai acuan siswa untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dengan adanya sistem poin ini diharapkan siswa lebih tertib dan disiplin dalam mematuhi peraturan di sekolah.

c. Penerapan Sistem Poin

Penerapan sistem poin pelanggaran dilaksanakan oleh seluruh siswa dan melibatkan guru dan orang tua siswa. Sebab pendidikan siswa adalah tanggung jawab bersama. Penerapan sistem poin diterapkan berdasarkan banyaknya perilaku siswa yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Adanya siswa yang melanggar peraturan maka sekolah menerapkan suatu hukuman supaya siswa memiliki rasa jera. Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran dilaksanakan dengan memberi skor poin oleh guru dengan menulis nama, kelas, jenis pelanggaran di buku daftar catatan poin siswa. Kemudian buku poin tersebut diserahkan kepada wali kelas untuk

¹⁰ Oktovina Mabuka, "Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2021): 367.

direkapitulasi pada buku rekapitulasi poin yang ada di sekolah. Selanjutnya pada akhir semester, siswa yang sudah mencapai skor poin pelanggaran mencapai batas maksimal maka akan dilakukan pemanggilan orang tua, skorsing atau bisa juga sampai dikeluarkan dari sekolah (*drop out*) dan siswa yang berprestasi akan mendapatkan sebuah penghargaan. Hukuman yang diberikan berupa poin dari pelanggaran yang dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan kesepakatan orang tua dan wali murid.¹¹

d. Manfaat Sistem Poin

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem poin yaitu sebagai berikut.¹²

1) Terdapat kejelasan catatan pelanggaran siswa.

Manfaat yang diperoleh siswa ketika sekolah menerapkan sistem poin yaitu memudahkan guru dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi, penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran adil serta tidak berat sebelah.

2) Menurunkan jumlah persentasi pelanggaran siswa.

Manfaat yang diperoleh siswa adanya penerapan sistem poin yaitu pelanggaran tata tertib semakin berkurang. Meskipun belum maksimal masih terdapat siswa yang melanggar, setidaknya siswa yang melanggar peraturan semakin sedikit.

¹¹ Usnaful Juhri, "Penerapan Sistem Point dalam Meningkatkan Perilaku Tanggung Jawab Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 3 Madiun" (IAIN Ponorogo, 2023), 30.

¹² Purnama Sari Wiken et al., "Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2023): 200.

3) Peringatan bagi siswa

Manfaat diterapkannya sistem poin yaitu memberi peringatan (*warning*) kepada diri siswa agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Manfaat dari sistem poin bagi siswa yaitu mampu mengurangi tingkat pelanggaran siswa serta membuat siswa lebih disiplin perilaku dan disiplin waktu. Hal ini karena seluruh peraturan yang ada dalam buku panduan tata tertib sekolah lebih bisa dipatuhi. Meskipun tidak berupa hukuman, sistem poin merupakan salah satu alternatif untuk mendisiplinkan siswa. Dengan diberlakukannya sistem poin siswa mampu mengetahui telah melakukan pelanggaran berapa kali dan siswa lebih jera untuk mengulangi kesalahannya kembali. Selain itu, manfaat bagi guru dan sekolah adanya kebijakan penerapan sistem poin ini adalah kedisiplinan siswa lebih tercapai serta siswa mampu terbiasa tertib di sekolah.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya sistem poin ini tidak hanya untuk siswa saja tetapi bermanfaat bagi guru juga. Dimana siswa lebih disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah dan takut untuk melakukan kesalahan yang melanggar aturan tata tertib. Bagi guru siswa mampu menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah secara tertib dan disiplin.

¹³ Ipnu Wuldanari, "Penerapan Program Sistem Poin di SMK Negeri 2 Yogyakarta," *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 124.

2. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu *discere* yang artinya belajar. dalam perkembangannya, kata *discere* menjadi kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dalam bahasa Inggris kata *discipline* mempunyai arti kepatuhan atau hal-hal yang menyangkut tata tertib. Sementara dalam bahasa Indonesia kata disiplin sering dikaitkan dengan istilah tata tertib atau ketertiban.¹⁴ Disiplin juga dapat diartikan sebagai ketaatan seseorang dalam memenuhi ketentuan atau peraturan yang bisa membangun perilaku serta sikap positif terhadap orang yang melakukan.¹⁵

Menurut Napoleon, kedisiplinan adalah satu-satunya sarana yang membuat orang dapat memfokuskan pikirannya pada objek tujuan utama yang pasti, sampai daya kebiasaan semesta mengambil alih pola tujuan itu dan mulai menerjemahkan menjadi padanan materialnya. Kedisiplinan adalah sumber segala kegigihan dan sarana untuk mengembangkan kebiasaan bertindak berdasarkan rencana dan tujuan. Kedisiplinan adalah kekuatan yang membuat segala kebiasaan berpikir dipolakan dan

¹⁴ Nicholas Mamonto, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, *Disiplin Dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 25.

¹⁵ Utami Mega, Mukhlison Effendi, dan Mukhibat, "Analisis Nila Moral dan Manfaatnya untuk Pembelajaran SD/MI: Penelitian Novel Anak-Anak Merapi Karya Bambang Joko Susilo," *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 7, no. 1 (2022): 60.

dilanjutkan sampai kebiasaan ini diambil alih oleh daya kebiasaan semesta dan dilangsungkan hingga puncaknya logis.¹⁶

Menurut John Garmo, kedisiplinan adalah kualitas inti dari tanggung jawab pribadi. Kedisiplinan diri terlihat melalui kerapian, ketepatan waktu, sikap hemat, dan lain-lain. Kedisiplinan memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang mereka tahu, mereka harus lakukan, dan di mana mereka menginginkan itu atau tidak. Hal tersebut didasarkan pada penerimaan mereka akan tanggung jawab pribadi mereka dan setiap aspek dalam hidupnya. Kedisiplinan memungkinkan seseorang untuk berkonsentrasi dalam mencapai tujuan, baik di bidang pendidikan, olahraga, musik, bisnis, atau hubungan antar pribadi. Walaupun tanpa penyemangat dari luar atau larangan-larangan, seorang yang disiplin dapat mengatasi kelemahannya, dan berkembang menjadi kekuatan.¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, kedisiplinan adalah peran penting dalam menciptakan tujuan pendidikan. Kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling pokok yaitu faktor lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kedisiplinan sebuah tindakan yang mampu membuat seseorang mencapai tujuan yang berkualitas.

¹⁶ Napoleon Hill, *The Master Key to Riches Pembuka Pintu-Pintu Kekayaan dan Kebahagiaan* (Jakarta Selatan: PT. Cahaya Intan Suci, 2008), 268.

¹⁷ John Garmo, *Pengembangan Karakter Untuk Anak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2013), 45.

b. Tujuan Kedisiplinan Peserta didik

Tujuan dari kedisiplinan adalah untuk membuat peserta didik terlatih dan terkontrol dalam belajar sehingga memiliki kecakapan cara belajar yang baik, proses pembentukan perilaku yang baik sehingga mencapai pribadi yang luhur tercermin dalam penyesuaian perilaku dengan aturan-aturan yang ditetapkan, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan diri sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar.¹⁸

Tujuan disiplin di sekolah sendiri yaitu untuk menciptakan keamanan, kenyamanan bagi siswa serta kegiatan pembelajaran di sekolah. Disiplin sangatlah penting dalam proses pendidikan, maka dari itu sekolah pasti memiliki sebuah aturan yang harus diikuti serta diterapkan oleh setiap siswa. Contoh kedisiplinan yang diterapkan pada siswa yaitu selalu hadir tepat waktu. Aturan yang diberlakukan bagi bagi siswa menjadi landasan kedisiplinan di sekolah. Disiplin di sekolah harus diterapkan agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, serta sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.¹⁹

Tujuan disiplin selanjutnya yaitu siswa dapat mematuhi tata tertib sekolah dan berdisiplin diri. Selanjutnya siswa yang melanggar tata tertib diberikan sanksi dengan tujuan agar siswa tidak mengulangi lagi perbuatan

¹⁸ Faiqotul Isnaini dan Muh. Ekshan Rifai, *Strategi Self-Management Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar* (Sukoharjo: CV Sindunata, 2019), 17.

¹⁹ Agustin Sukses Dakhi, *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), 2.

pelanggarannya. Kemudian disiplin harus selalu ditanamkan kepada siswa sampai hal ini menginternalisasi dalam diri siswa. Berikutnya bahwa siswa akan berhasil, tujuan pendidikan akan tercapai bila siswa memiliki disiplin yang tinggi. Dengan disiplin diharapkan akan terwujud lingkungan yang tertib, budaya guna dan berhasil guna melalui seperangkat peraturan yang jelas dan tepat. Disiplin juga merupakan latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu menaati tata tertib.²⁰

c. Manfaat Disiplin dalam Pendidikan

Disiplin memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut.²¹

- 1) Membuat siswa menjadi cakap terhadap belajarnya agar lebih baik.
- 2) Tertib serta teratur dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
- 3) Aman dan teratur dalam kehidupannya.
- 4) Mencegah dari perilaku hidup sembarangan.
- 5) Mengutamakan kepentingan orang lain.
- 6) Biasa hidup tertib di semua lingkungan.

Disiplin bukan hanya harus diterapkan pada lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat karena semua elemen lingkungan sangat memerlukan disiplin yang kuat. Disiplin tidak dapat dirasakan manfaatnya saat ini bagi kalangan siswa, akan tetapi kelak pada

²⁰ Agustin Sukses Dakhi, *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), 2-6.

²¹ Nicholas Mamonto, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, *Disiplin Dalam Pendidikan*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 20–21.

masa depan dapat dirasakan manfaat dari penerapan disiplin. Manakala disiplin dilakukan dengan sepenuh hati dengan kesadaran diri, sudah tentu akan tumbuh menjadi siswa yang berkarakter kuat terutama pada aspek disiplinnya. Di sinilah peran guru sebagai pembimbing agar selalu mengarahkan siswanya untuk menjadi manusia yang memiliki disiplin tinggi. Orang tua memiliki tugas penting agar selalu menekankan dan menanamkan disiplin sejak kecil di lingkungan keluarganya. Contoh disiplin dari kalangan guru dan orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa baik dalam bentuk konsep maupun praktiknya apalagi akan sangat memiliki kesan manakala disertai dengan contoh nyata dalam bentuk perbuatan sehari-hari.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Peserta didik

Beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pada peserta didik berasal dari faktor internal dan eksternal, diantaranya sebagai berikut.²²

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kemauan, motivasi, dan sikap.

²² Nicholas Mamonto, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, *Disiplin dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 53.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar individu, seperti keluarga, lingkungan sekolah dan pengaruh media sosial. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

a) Pola asuh orang tua

Pola asuh yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap disiplin pendidikan anak.

b) Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah juga berpengaruh pada disiplin pendidikan siswa. Pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran aturan sekolah juga dapat membantu meningkatkan disiplin siswa.

c) Pengaruh media sosial

Pengaruh media sosial terhadap disiplin pendidikan anak juga semakin meningkat. Peran orang tua dan pengawas sekolah sangat penting dalam mengawasi penggunaan media sosial anak.

e. Indikator Kedisiplinan

Kedisiplinan siswa di sekolah mencakup beberapa perilaku yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu berupa kewajiban dan perilaku yang harus dihindari. Kedua kelompok perilaku di rumuskan secara tertulis ke dalam bentuk peraturan tata tertib di sekolah maupun di masyarakat. Elizabeth

Hurlock dalam Ahmad Susanto mengungkapkan beberapa indikator penting dalam disiplin, yaitu: peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi.²³

1) Peraturan

Peraturan merupakan pola yang diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuan peraturan tersebut merupakan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang sudah diakui dalam situasi dan kelompok tertentu. Peraturan mempunyai dua fungsi penting yaitu peraturan mempunyai fungsi pendidikan dan fungsi preventif. Fungsi pendidikan sebagai peraturan adalah alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok kepada siswa, sedangkan fungsi preventif disebabkan karena peraturan diharapkan dapat membantu mengekang atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Peraturan yang efektif mampu membantu seorang siswa merasa terlindungi sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Isi setiap peraturan harus mencerminkan hubungan yang serasi antara anggota keluarga, mempunyai dasar yang logis untuk membuat berbagai kebijakan, serta menjadi model perilaku yang harus terwujud di dalam keluarga. Peraturan dapat diubah agar dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan, pertumbuhan fisik, usia, dan kondisi saat ini dalam keluarga.

²³ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

2) Hukuman²⁴

Hukuman berasal dari kata kerta Latin *punre* yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena telah melakukan suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman itu sendiri mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai berikut.

- a) Menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Apabila siswa menyadari bahwa tindakan tertentu akan dihukum, mereka biasanya melakukan tindakan tersebut karena teringat akan hukuman yang dirasakannya di waktu lampau akibat tindakan yang dilakukannya tersebut.
- b) Mendidik, sebelumnya siswa mengerti peraturan, siswa mampu belajar bahwa suatu tindakan benar atau salah dengan mendapat hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila melakukan tindakan yang diperbolehkan.
- c) Hukuman memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tentang akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.

3) Penghargaan

Penghargaan artinya setiap bentuk imbalan, yakni suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi juga dapat

²⁴ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 127.

berupa kata-kata, pujian, senyuman, atau tepukan di punggung dan belaian. Penghargaan mempunyai tiga peran penting, yaitu sebagai berikut.

- a) Penghargaan mempunyai nilai mendidik.
 - b) Penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial.
 - c) Tidak adanya penghargaan melemahkan perilaku.
- 4) Konsistensi

Konsistensi menggambarkan tingkat keseragaman, kestabilan, atau kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi memiliki fungsi mendidik yang besar, memberi motivasi yang kuat untuk melakukan tindakan yang baik dalam masyarakat dan menjauhi tindakan yang buruk, membentuk perkembangan siswa untuk menghormati peraturan-peraturan masyarakat sebagai otoritas, siswa yang telah berdisiplin secara konsisten mempunyai motivasi yang lebih kuat dan komitmen untuk berperilaku sesuai standar sosial yang berlaku dibandingkan dengan siswa yang berdisiplin secara konsisten.²⁵

f. Jenis-Jenis Kedisiplinan

Imam Musbikin menyebutkan beberapa jenis-jenis kedisiplinan diantaranya sebagai berikut.²⁶

²⁵ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: Kencana, 2018), 128.

²⁶ Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Disiplin* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021), 12–13.

1) Disiplin Preventif

Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para siswa agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran tokohnya adalah untuk mendorong kedisiplinan yang ada pada diri siswa. Dengan cara ini siswa akan menjaga disiplin diri mereka sendiri dan bukan karena suatu paksaan.

2) Disiplin Korektif

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan. Secara umum tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut: a) untuk memperbaiki pelanggaran, b) untuk menghalangi siswa lain melakukan pelanggaran, c) untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif.

3) Disiplin Progresif

Disiplin progresif merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

berulang. Tujuannya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebuah contoh sistem progresif yang disusun atas dasar tingkat berat atau kasarnya hukuman secara ringkas dapat ditunjukkan sebagai berikut: a) teguran secara lisan oleh guru, b) teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia, c) skorsing dari sekolah satu sampai tiga hari, d) skorsing data minggu atau lebih, e) tidak naik kelas, f) dikeluarkan dari sekolah/drop out.

3. Bentuk Pelanggaran Peserta didik di Sekolah

Menurut Agustin Sukses Dakhi disebutkan terkait beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah, diantaranya sebagai berikut.²⁷

- a. Berpakaian tidak rapi, tidak bersih atau tidak sesuai dengan tata tertib sekolah.
- b. Sering terlambat ke sekolah.
- c. Terlambat ke dalam ruangan.
- d. Merokok baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- e. Melawan atau menentang dan menghina guru baik dengan kata-kata maupun fisik.
- f. Ribut atau mengganggu teman di dalam kelas.

²⁷ Agustin Sukses Dakhi, *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), 7–8.

- g. Tidak memberi perhatian pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- h. Melakukan perkelahian.
- i. Meninggalkan sekolah tanpa izin piket atau istilah cabut les pada jam pembelajaran belum berakhir.
- j. Tidak mengerjakan tugas di kelas dan tugas di rumah.
- k. Sering alpa atau tidak sekolah tanpa pemberitahuan.
- l. Tidak tenang dalam barisan.
- m. Merusak fasilitas sekolah.

Contoh peraturan dan tata tertib sekolah yang secara eksplisit harus dicegah oleh siswa, menurut Depdiknas dalam buku Ahmad Susanto yaitu.²⁸

- 1) Merokok, mengonsumsi minuman keras dan narkoba, tawuran, dan berpacaran di sekolah.
- 2) Berkelahi, baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah.
- 3) Membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoreng dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan, dan peralatan sekolah lainnya.
- 4) Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa antarsesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan yang tidak senonoh.
- 5) Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.

²⁸ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 127.

- 6) Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.

Dalam pelaksanaan peraturan siswa yang terbukti tidak disiplin, dalam arti melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, kelas dan guru akan mendapatkan sanksi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh sekolah. Kriteria tersebut berhubungan dengan jenis pelanggaran, jumlah pelanggaran atau intensitas pelanggaran. Sanksi diberikan secara bertingkat, mulai dari yang paling ringan sampai yang seberat-beratnya oleh guru, wali kelas, atau kepala sekolah. Peraturan dan sanksi secara sistematis ditujukan untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pihak sekolah berupaya menciptakan suatu kondisi di mana pencapaian siswa terhadap tujuan pendidikan tidak terganggu atau terhambat oleh perilaku yang tidak perlu. Apabila sanksi terhadap siswa tidak dapat dihindarkan, prosedur yang ditempuh tetap berada pada koridor etika. Dengan peraturan dan sanksi dapat digunakan untuk membantu individu mengubah sikap dan tingkah laku siswa yang mengalami gangguan berhubungan dengan masalah motivasi dan disiplin belajar di sekolah.²⁹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan pada tahun 2018, Jurnal dengan judul “Penerapan Hukuman untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat”. Tujuan dari penelitian

²⁹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 128.

ini yaitu mengetahui konsep, pelaksanaan dan hasil hukuman bagi peningkatan disiplin siswa di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah pada tahun 2017 melalui pengalaman terbaik (*best practice*).

Hasil dari penelitian ini adalah hukuman dalam bentuk penegakan disiplin pendidikan merupakan keharusan dalam melatih diri siswa hidup bertanggung jawab, mandiri dan berprestasi. Pelaksanaan dalam bentuk hukuman yang sederhana dengan membersihkan lingkungan sekolah dan denda membawa vasing merupakan suatu hal untuk membuat jera serta tidak mengulang lagi keterlambatan masuk sekolah. adanya penerapan hukuman tersebut berpengaruh sangat signifikan pada disiplin siswa agar tidak terbiasa lagi siswa SMK Negeri 1 Pangkalan Bun terlambat masuk sekolah.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai kedisiplinan siswa di sekolah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu Ridwan meneliti mengenai penerapan hukuman serta subjek yang diteliti adalah siswa SMK sedangkan peneliti saat ini meneliti mengenai penerapan sistem poin pelanggaran dan subjek dari penelitian ini adalah siswa MI.³⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah pada tahun 2019, Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Monitoring Tata Tertib (SIMONTA) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019”. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui mekanisme sistem

³⁰ Ridwan, “Penerapan Hukuman Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat,” *Jurnal Ilmiah Pro Guru* 4, no. April (2020): 5–24.

monitoring tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019, 2) untuk mengetahui pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinana siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019, 3) untuk mengetahui tindak lanjut hasil pelaksanaan sistem monitoring tata tertib (Simonta) dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) mekanisme sistem monitoring tata tertib (Simonta) untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 2018-2019 yaitu apabila terdapat siswa yang terbukti melakukan pelanggaran aturan tata tertib maka dari tim tata tertib maupun guru BK dapat secara langsung menginput skor pelanggarannya kedalam aplikasi Simonta. Simonta adalah trobosan baru yang dibuat dalam rangka meningkatkan kedisiplinan siswa. Selain itu, SMK Negeri 2 Ponorogo mampu menunjukkan eksistensinya dengan berupaya menekan angka pelanggaran tata tertib dengan Simonta yang dirancang untuk merekam pelanggaran siswa. Adanya Simonta ini bertujuan untuk memudahkan sekolah dalam memantau dan mengawasi tingkat disiplin siswa dan dapat segera tanggap dalam memberi tindak lanjutnya.

Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti dalam kedisiplinan siswa di sekolah. Perbedaan dari peneliti tersebut yaitu Siti Umi

Rohmah membahas mengenai sistem monitoring tata tertib siswa SMK sedangkan peneliti membahas mengenai kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran.³¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saidah Laugi pada tahun 2019, Jurnal dengan judul “Penerapan Tata Tertib Sistem Poin Untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konowe”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang penerapan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Konowe, kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Konowe, strategi penerapan tata tertib sekolah dalam rangka membangun disiplin siswa di SMA Negeri 1 Konowe. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan tata tertib adalah langkah strategis yang harus diambil oleh sekolah. Praktik yang diberitahukan di SMA Negeri 1 Konowe mampu menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya, terutama terkait dengan pembinaan disiplin siswa. Kondisi kedisiplinana siswa di setiap sekolah cenderung bervariasi, tetapi dengan penerapan tata tertib secara efektif dan humanis, maka kecenderungan disiplin siswa yang rendah dapat diperbaiki. Selain itu, penerapan tata tertib tidak hanya menjadi domain pimpinan sekolah dan guru, tetapi merupakan kolaborasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat.

³¹ Siti Umi Rohmah, “Implementasi Sistem Monitoring Tata Tertib (Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019” (IAIN Ponorogo, 2020), 101.

Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai membangun disiplin siswa dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu Saidah Laugi meneliti mengenai tata tertib sekolah, sedangkan peneliti saat ini meneliti mengenai penerapan sistem poin yang ada di sekolah.³²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mayang Mirna Dwi Fauni pada tahun 2020, Skripsi dengan judul “Penerapan Tata Tertib Sistem Poin Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tata tertib sistem poin untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian metode deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan tata tertib sistem poin yang dilaksanakan sudah cukup baik melibatkan semua pihak sekolah, perencanaan, sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan melalui rapat dan *workshop*. Berdasarkan adanya sistem poin ini guru sangat mudah untuk memberikan hukuman, menjadikan siswa lebih disiplin, serta siswa akan lebih jera untuk melakukan pelanggaran. Beberapa kendala yang dihadapi sekolah yaitu jarak antara rumah siswa ke sekolah cukup jauh, buku tata tertib pribadi siswa hilang atau terselip, kurangnya sosialisasi dengan orang tua,

³² Saidah Laugi, “Penerapan Tata Tertib Sekolah untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe,” *Shautut Tarbiyah* 25, no. 2 (2019): 255.

karakter dari siswa sendiri, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara guru bidang studi.

Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai kedisiplinan siswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Mayang Mirna Dwi Fauni dengan peneliti yaitu dilihat dari subjek penelitian Mayang menggunakan subjek penelitian pada siswa SMP, sedangkan peneliti pada penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada siswa MI. Pada penelitian yang dilakukan Mayang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti sekarang menggunakan jenis penelitian studi kasus.³³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Durotul Khamidah pada tahun 2021, Skripsi dengan judul “Peran Pengurus dalam Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Santriwati di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo”. Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui strategi yang diterapkan pengurus di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dalam membentuk kedisiplinan serta tanggung jawab santriwati, 2) untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter kedisiplinan dan tanggung jawab santriwati di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

³³ Mayang Mirna Dwi Fauni, “Penerapan Tata Tertib Sistem Poin untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta” (Skripsi, IIQ Jakarta, 2020), 20.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab perlu dilakukan beberapa strategi seperti kegiatan ekstrakurikuler, Masa Ta'aruf Santri Baru, memberikan hukuman bagi yang melanggar, pengumpulan handphone, pengawasan, dan melaksanakan penegakan berupa melakukan pembinaan dengan memberikan motivasi dan nasihat.

Penelitian ini mempunyai persamaan pada hasil yaitu sama-sama membentuk kedisiplinan siswa melalui hal yang positif seperti memberikan sanksi bagi yang melanggar dalam kedisiplinan siswa. Perbedaan dari penelitian Durotul Khamidah yaitu berdasarkan strategi yang digunakan Durotul yaitu melalui peran pengurus, peneliti sekarang meneliti dengan strategi sistem poin kepada siswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Durotul menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti sekarang menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.³⁴

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebaruan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dan kebaruan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjek penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti pada siswa SMP, SMA. Peneliti saat ini menggunakan subjek penelitian pada siswa MI. Selanjutnya peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti sekarang menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti

³⁴ Durotul Khamidah, "Peran Pengurus dalam Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Santriwati di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 44-74.

sekarang memfokuskan terkait kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa.

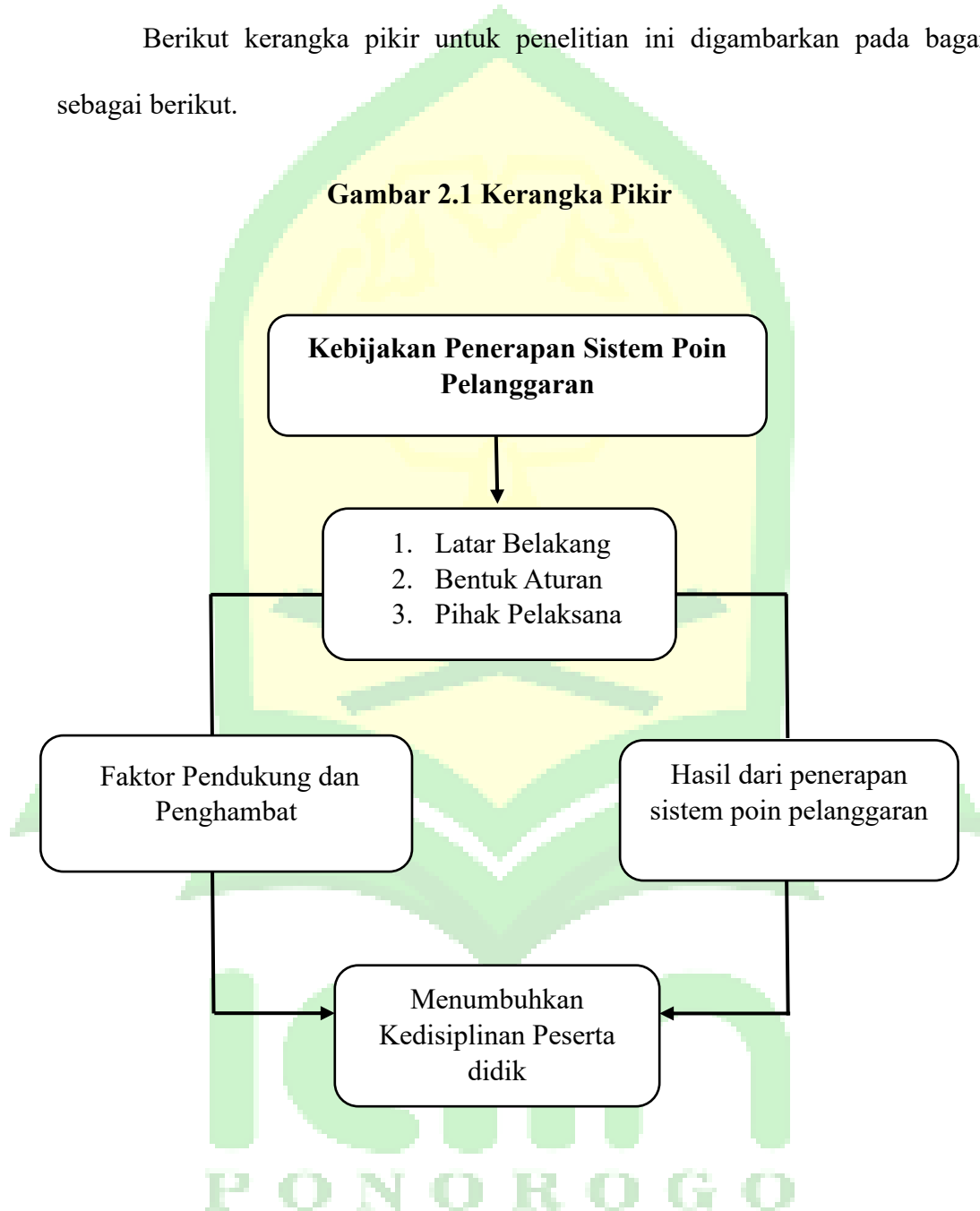
C. Kerangka Pikir

Kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran merupakan bentuk kebijakan yang tertera dalam buku catatan tata tertib sekolah dalam aspek kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran. Pemberian poin yang diberikan beragam, bergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Tujuan sistem poin ini adalah untuk membuat peserta didik menjadi lebih rajin pada kegiatan sekolah dan agar siswa taat pada aturan dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah.

Kedisiplinan memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang mereka tahu, mereka harus lakukan, dan di mana mereka menginginkan itu atau tidak. Hal tersebut didasarkan pada penerimaan mereka akan tanggung jawab pribadi mereka dan setiap aspek dalam hidupnya. Dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa di sekolah, mencakup beberapa perilaku yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu berupa kewajiban yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari. Kedua kelompok perilaku di rumuskan secara tertulis ke dalam bentuk peraturan tata tertib di sekolah. Terkait peraturan yang sudah ditetapkan faktor pendukung menjadi sangat penting dalam menjalankan kebijakan ini, namun faktor

penghambat yang terjadi menjadi tantangan bagi sekolah dalam menjalankan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran ini.

Berikut kerangka pikir untuk penelitian ini digambarkan pada bagan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.¹

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam terkait masalah, konteks, serta berbagai peristiwa yang terjadi. Seorang individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat semuanya mampu menjadi sebagai subjek penelitian. Untuk mengumpulkan data studi kasus terkait kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik di MIN 3 Ponorogo dapat digunakan dengan berbagai pendekatan, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 3 Ponorogo yang beralamat di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 13, Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30-31.

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 112.

Ponorogo, Jawa Timur 63463. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan MIN 3 Ponorogo merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Ponorogo yang telah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran dengan baik. Selain itu alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan terdapat peserta didik yang masih melanggar peraturan yang ada di sekolah, serta ingin mengetahui kebijakan sistem poin yang diterapkan guna menumbuhkan kedisiplinan peserta didik di MIN 3 Ponorogo. Penelitian ini dilakukan pada waktu bulan Februari sampai Maret tahun 2024 setelah melakukan bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing untuk melaksanakan penelitian di sekolah.

C. Sumber Data

Data kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifact* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Informasi akan digali dengan berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi.³

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diambil dari proses pengamatan, wawancara atau hasil observasi oleh peneliti yang melibatkan secara langsung dengan

³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 108.

menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil dari melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terdiri sebagai berikut.

- a) Kepala Sekolah
- b) WAKA Kesiswaan
- c) Guru Kelas IV
- d) Peserta didik kelas IV MIN 3 Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa melawati orang lain maupun dengan dokumen. Data diperoleh peneliti dengan memanfaatkan dokumen pendukung penelitian di MIN 3 Ponorogo.

Dokumen tersebut berupa profil lembaga, hasil catatan kepribadian sikap siswa di buku catatan poin, serta foto yang berkaitan langsung dengan proses penerapan sistem poin yang ada di MIN 3 Ponorogo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.⁴

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ALFABETA, 2022), 104.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.⁵

Pada kegiatan observasi peneliti mengobservasi pada saat siswa berangkat sekolah, pembelajaran di kelas, istirahat, dan pada saat mengikuti upacara bendera.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Pada tahap wawancara, peneliti menggali berbagai informasi mengenai kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran, hasil dari penerapan sistem poin pelanggaran serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa MIN 3 Ponorogo.

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 147.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 186.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan sebagainya.⁷

Dokumentasi pada penelitian ini berupa proses penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran yang berlangsung kepada siswa yang melanggar peraturan serta foto perolehan skor poin di buku catatan poin siswa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸ Dalam penelitian ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif akan menggunakan analisis data interaktif dengan model Miles & Huberman dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.⁹

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 149.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 320.

⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018), 36–38.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, dimana peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali suruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dirangkum. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang sudah didapatkan berdasarkan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran yang diterapkan oleh MIN 3 Ponorogo.

2. Display Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian kita mendapatkan banyak data. Dalam display data akan terlihat dengan jelas dan tersusun secara sistematis. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian dari data yang diperoleh dari penelitian mengenai kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran yang ada di MIN 3 Ponorogo.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data, sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Pada tahap verifikasi data, peneliti mampu menarik kesimpulan melalui data yang telah terkumpul mengenai

kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran yang diterapkan oleh MIN 3 Ponorogo.

F. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kedayanalan (*realibilitas*) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.¹⁰ Terkait dengan teknik pemeriksaan keabsahan data, terdapat berbagai macam cara diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci (*thick description*). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti memilih menggunakan keabsahan data dengan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹¹

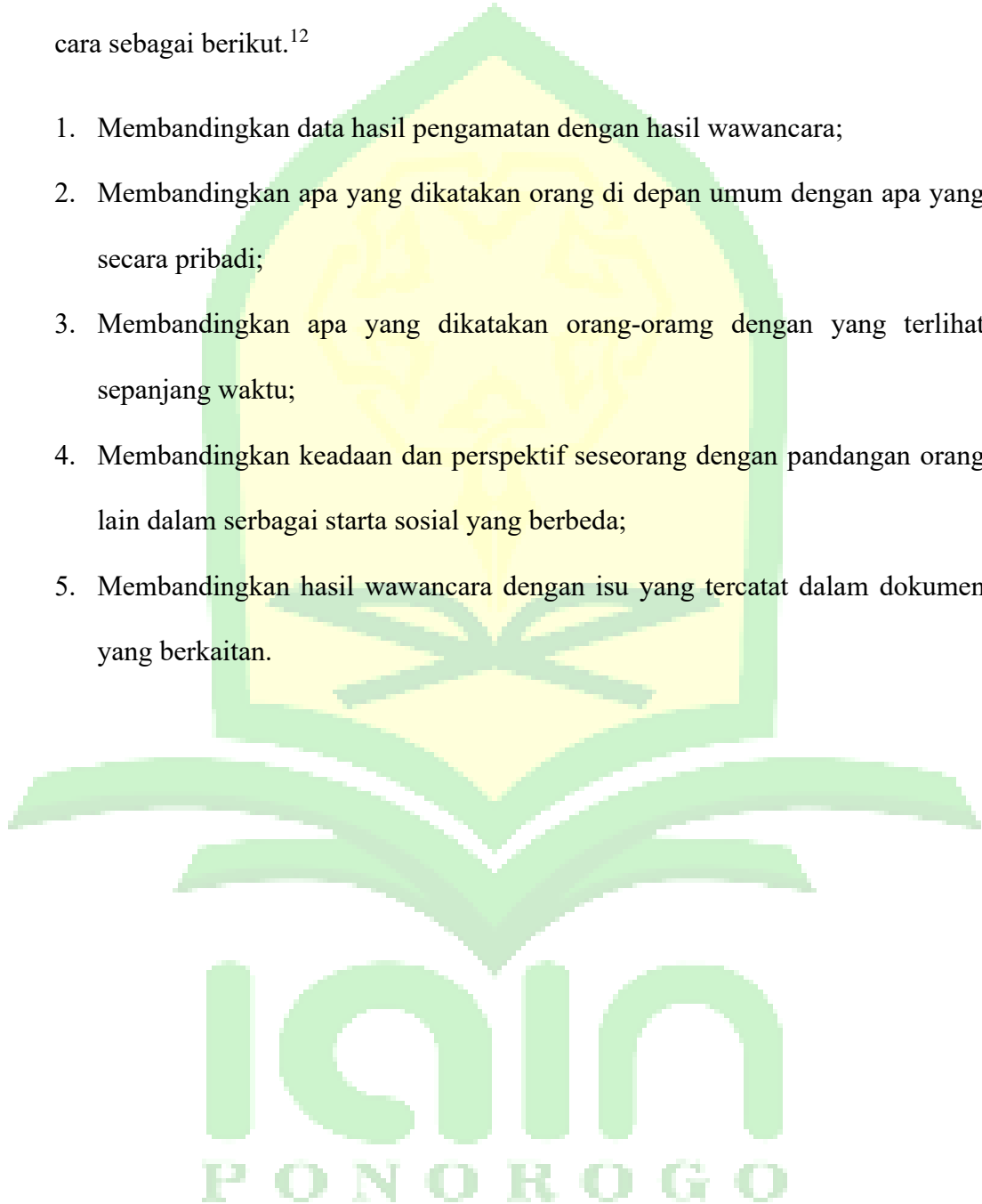
Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara kepada kepala sekolah, guru kelas IV, waka kesiswaan, siswa dan semua yang bersangkutan dalam mendapatkan data

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 321.

¹¹ Moleong, 330.

mengenai penelitian kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran sebagai peningkatan kedisiplinan di MIN 3 Ponorogo. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut.¹²

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan yang terlihat sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam serbagai starta sosial yang berbeda;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan.



¹² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah MIN 3 Ponorogo

MIN 3 Ponorogo adalah sebuah madrasah yang terletak di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 13, Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah yang dulunya bernama Madrasah Ibtida'iyah Pesantren Sabilil Muttaqien (MI PSM) Janti ini berpusat di Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 1996 atau 5 Syawal 1385 Hijriyah. Awal mula sekolah ini seluruh siswanya masuk di sore hari dan mulai pada tahun 1969 mulai diberlakukan masuk pagi hari. Cita-cita utama yayasan PSM ini adalah “Madrasah ini nanti jangan hanya menjadi MI Swasta tetapi harus menjadi MI Negeri”.

Pada waktu itu, Madrasah Negeri yang ada di Ponorogo hanya ada dua unit, yaitu Madrasah Negeri Bogem Sampung dan Madrasah Negeri Lengkong Sukorejo. MIN tersebut harus punya filial masing-masing dua Madrasah Swasta. Tepatnya pada tanggal 18 Maret 1985 dengan Surat Keputusan Kantor Kepala Wilayah Depag Provinsi Jawa Timur Nomor Wm. 06-02/1326/SKP/1989, MI PSM Janti menjadi Madrasah Filial (kelas jauh) MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. Pada tahun 1996 pemerintah membuka usul pembukaan dan penergian Madrasah Ibtida'iyah Negeri.

Kesempatan baik ini tidak di sia-siakan oleh pengurus Yayasan PSM. Mereka mengajukan usul kepada Pemerintah supaya MI PSM dapat diterima menjadi MI Negeri. Usulan tersebut tertanggal 20 Maret 1996, selang satu tahun berikutnya MI PSM dinyatakan menjadi MI penih dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1997 oleh Menteri Agama RI Dr. H. Tarmizi Taher.¹

2. Profil MIN 3 Ponorogo

a. Identitas Madrasah

Nama Madrasah : MIN 3 Ponorogo
NSM : 111135020005
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Ponorogo
Kecamatan : Slahung
Desa/Kelurahan : Janti
Jalan dan Nomor : Jl. Mayjen Panjaitan, No. 13
Kode Pos : 63463
Telepon : 081335577997
Email : minjanti@gmail.com
Status Sekolah : Negeri
Bagunan Sekolah : Milik Sendiri

¹ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/15-02/2024.

Tahun Penegerian : 1997

Luas Tanah : 2489 M²

b. Kepala Madrasah

Nama : Nur Hamid, S.Pd.I.

NIP : 197605292005011004

Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/d

Pendidikan : S1 PAI

Alamat : Desa Bogem, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo²

3. Visi, Misi dan Tujuan MIN 3 Ponorogo

a. Visi

“Terwujudnya Madrasah Berwawasan Global yang Menguasai IPTEK dan Mengamalkan IMTAQ”.

Dengan indikator visi sebagai berikut :

- 1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Memiliki daya saing dalam prestasi Ujian Sekolah/Madrasah.
- 3) Memiliki daya saing dalam memasuki madrasah dan perguruan tinggi yang favorit.
- 4) Memiliki daya saing dalam memasuki lapangan pekerjaan.

² Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/15-02/2024.

- 5) Memiliki daya saing dalam prestasi Olimpiade Matematika, IPA, KIR pada tingkat lokal, Nasional dan/atau Internasional.
- 6) Memiliki daya saing dalam prestasi ICT.
- 7) Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga.
- 8) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.
- 9) Memiliki kemandirian, kemampuan beradaptasi dan *survive* di lingkungannya.
- 10) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar.

b. Misi

- 1) Membekali siswa dengan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, melalui pemberdayaan mata pelajaran agama.
- 2) Meningkatkan pencapaian prestasi yang unggul disegala bidang keilmuan.
- 3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang inovatif dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan daya saing siswa dengan mengoptimalkan sarana prasarana belajar, metode pengajaran, penambahan alokasi waktu belajar.
- 5) Membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya masyarakat.

P O N O R O G O

c. Tujuan

- 1) Sebanyak 90% lulusan MIN 3 Ponorogo dapat diterima di SMP/MTs/Pondok pesantren favorit di wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya.
- 2) Berprestasi dalam event berbagai lomba akademis maupun non akademis di tingkat Kabupaten.
- 3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan, perpustakaan, laboratorium, koperasi, UKS, Bimbingan Konseling, kantin, mushola secara maksimal.
- 4) Diharapkan 99% siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan bertindak sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.³

4. Sumber Daya Manusia (Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa) MIN 3 Ponorogo

a. Data Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4. 1 Data Guru dan Tenaga Kependidikan⁴

No.	Nama	Jabatan
1.	Nur Hamid, S.Pd.I.	Kepala Madrasah
2.	Ulfita Lutfiana, S.Pd.I.	Guru Kelas I Ar Rahman
3.	Umi Salamah, S.Pd.I.	Guru Kelas I Ar Rahiim
4.	Endamg Wahyuni, S.Pd.I.	Guru Kelas I Al Malik
5.	Suryani, S.Pd.	Guru Kelas I Al Quddus
6.	Evin Fatma Fidhiyanti, S.Pd.	Guru Kelas II As Salaam
7.	Sri Sukatmini, S.Pd.I	Guru Kelas II Al Mu'min

³ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/15-02/2024.

⁴ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 04/D/15-02/2024.

8.	Murdaini, S.Pd.I.	Guru Kelas II Al Muhaimin
9.	Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I.	Guru Kelas II Al 'Aliy
10.	Imam Muslim, S.Pd.I.	Guru Kelas III Ar Razzaaq
11.	Yudi Rochmat Setiyawan, S.Ag.	Guru Kelas III Al Fattaah
12.	Ahmad Baihaqi, M.Pd.	Guru Kelas III Al Lathiif
13.	Tulus, S.Ag, M.Pd.I.	Guru Kelas III Al Hafizh
14.	Sufyan Alimuddin, S.Pd.I.	Guru Kelas IV As Syakur
15.	Anjarwati, S.Pd.I.	Guru Kelas IV Al Kariim
16.	Siti Rohana Wahyuni, S.Pd.SD.	Guru Kelas IV Al Hakim
17.	Faridah Setyaningsih, S.Pd.SD.	Guru Kelas IV Al Jaliil
18.	Nanik Setyowati, S.Pd.I.	Guru Kelas V Al Majiid
19.	Puput Fendyatmoko, S.Pd.	Guru Kelas V An Nuur
20.	Rita Purwo Lestari, S.Pd.SD.	Guru Kelas V Al Mughnii
21.	Fitri Septariana, S.Pd.	Guru Kelas VI Ar Rasyiid
22.	Riyanto, S.Pd.	Guru Kelas VI As Shabuur
23.	Sayid Bachrudin, S.Pd.I.	Guru Kelas VI An Nafii'
24.	Katmini, S.Pd.	Guru PNS
25.	Widodo, M.Pd.	Guru PNS
26.	Supriadi, S.Pd.	Guru PNS
27.	Munib Rosyidi, S.Ag.	Guru PNS
28.	Jainury, S.Sos.I.	Guru PNS
29.	Laily Nur Azizah, S.Pd.	Guru PNS
30.	Marsini, S.Ag.	Guru PNS
31.	Rosyida Wahyuriana, S.Pd.	Guru Non PNS
32.	Anjarwati, S.Pd.I.	Guru Non PNS
33.	M. Arifin	Penjaga Sekolah
34.	Sulistiyantoro	Penjaga Sekolah
35.	Munika Febrianasari	Tata Usaha
36.	Mahsun Amani, S.Kom.	Operator Keuangan
37.	Sri Lestari	-
38.	Nur Khanafi	-

P O N O R O G O

b. Data Siswa

Tabel 4. 2 Data Siswa⁵

No.	Kelas	L	P	Jumlah
1.	I	36	45	81
2.	II	46	51	97
3.	III	35	46	81
4.	IV	46	44	90
5.	V	30	21	51
6.	VI	44	32	76
Total Siswa		239	237	476

5. Sarana dan Prasarana MIN 3 Ponorogo

Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana MIN 3 Ponorogo⁶

No.	Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kelas	22
2.	Ruang Kepala	1
3.	Ruang Guru	1
4.	Ruang TU	1
5.	Ruang Perpustakaan	1
6.	Ruang UKS	1
7.	Laboratorium Komputer	1
8.	Toilet Guru	2
9.	Toilet Siswa	3
10.	Kantin	1
11.	Dapur	1
12.	Gudang	1
13.	Meja Guru	26

⁵ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 04/D/15-02/2024.

⁶ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 05/D/15-02/2024.

14.	Kursi Guru	26
15.	Meja Siswa	464
16.	Kursi Siswa	464
17.	Papan Tulis	21
18.	Lemari Kantor	11
19.	Meja Kepala Madrasah	1

6. Deskripsi Pelanggaran dan Bobot Skor Poin

Kedisiplinan siswa di sekolah mencakup beberapa perilaku yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu berupa kewajiban dan perilaku yang harus dihindari. Kedua kelompok perilaku di rumuskan secara tertulis ke dalam bentuk peraturan tata tertib di sekolah maupun di masyarakat.

Elizabeth Hurlock dalam Ahmad Susanto mengungkapkan beberapa indikator penting dalam disiplin, yaitu: peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi.⁷ Salah satu indikator kedisiplinan yang mencakup dalam sistem poin ini adalah peraturan. Peraturan merupakan pola yang diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuan peraturan tersebut merupakan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang sudah diakui dalam situasi dan kelompok tertentu. Peraturan mempunyai dua fungsi penting yaitu peraturan mempunyai fungsi pendidikan dan fungsi preventif. Fungsi pendidikan sebagai peraturan adalah alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok kepada siswa, sedangkan fungsi preventif disebabkan karena

⁷ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

peraturan diharapkan dapat membantu mengekang atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Peraturan yang efektif mampu membantu seorang siswa merasa terlindungi sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Isi setiap peraturan harus mencerminkan hubungan yang serasi antara anggota keluarga, mempunyai dasar yang logis untuk membuat berbagai kebijakan, serta menjadi model perilaku yang harus terwujud di dalam keluarga. Peraturan dapat diubah agar dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan, pertumbuhan fisik, usia, dan kondisi saat ini dalam keluarga. Berikut deskripsi data peraturan yang ada di MIN 3 Ponorogo.

Tabel 4. 4 Deskripsi Pelanggaran dan Bobot Skor Poin⁸

a. Aspek Sikap/Perilaku

No.	Deskripsi Pelanggaran	Skor Poin
1.	Tidak membawa perlengkapan KBM	2
2.	Mencoret-coret sarana prasarana madrasah	2
3.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	2
4.	Mengganggu ketenangan KBM	2
5.	Menempatkan kendaraan tidak pada tempatnya	2
6.	Makan dan minum sambil berdiri/berjalan	2
7.	Mencaci maki teman, berkata-kata kotor, jorok, dll	4
8.	Berada pada tempat yang tidak semestinya pada waktu KBM	6

⁸ Lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor 06/D/15-02/2024.

9.	Berbuat tidak sopan pada guru dan karyawan	10
10.	Mencoret-coret sarana prasarana madrasah dengan kata-kata	10
11.	Berlaku tidak sopan/mencolek lawan jenis	10
12.	Membawaa Hdan Phone (HP) madrasah	15
13.	Merusak sarana prasarana madrasah	15
14.	Melompat jendela atau pagar	15
15.	Membawa rokok atau merokok di ingkungan madrasah	20
16.	Membawa/mengedarkan hal-hal yang bersifat porno	30
17.	Mencemarkan nama baik madrasah	30
18.	Merubah/memalsu nilai, tdana tangan, dan/atau data rapor	30
19.	Terlibat perkelahian di madrasah maupun di luar madrasah	40
20.	Berjudi, mabuk-mabukan, membawa miras/narkoba, membawa senjata tajam	70
21.	Mengancam keselamatan siswa, guru dan karyawan	70
22.	Mengambil hak orang lain/mencuri :	
	Kategori Ringan : senilai Rp 10.00,- s.d Rp 100.000,-	30
	Kategori Sedang : senilai Rp 101.000,- s.d Rp 250.000,-	50
	Kategori Berat : senilai > Rp 250.000,-	70
23.	Terlibat tindak kriminal berdasarkan keputusan pengadilan	100

b. Aspek Kerajinan/Kedisiplinan

No.	Deskripsi Pelanggaran	Skor Poin
1.	Datang terlambat 5-15 menit (pagi/pergantian KBM/setelah istirahat)	1
2.	Datang terlambat lebih dari 15 menit	2
3.	Tidak mengikuti shalat Dhuha/Dzuhur berjamaah sesuai ketentuan	2
4.	Tidak mengerjakan tugas sekolah/PR	2
5.	Tidak mengikuti upacara bendera	4
6.	Tidak masuk sekolah tanpa izin	4
7.	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa izin	1

c. Aspek Kerapian

No.	Deskripsi Pelanggaran	Skor Poin
1.	Tidak memasukkan baju (sesuai ketentuan)	1
2.	Atribut pakaian seragam tidak lengkap	2
3.	Memakai seragam/berpakaian tidak sesuai ketentuan	2
4.	Memakai aksesoris yang tidak semestinya (giwang, gelang, kalung bagi putra)	2
5.	Bersoleh berlebihan/seperti orang dewasa bagi putri	2
6.	Mengotori/tidak menjaga kebersihan sekolah	2
7.	Berambut panjang, potongan rambut tidak rapi bagi putra	2
8.	Menggunakan pewarna rambut	4
9.	Bertindik (bagi putra), bertato	6

d. Apresiasi

Peserta didik yang mencapai akumulasi poin penghargaan minimal 50 dalam satu tahun (setelah dikurangi poin pelanggaran), mendapatkan piagam penghargaan dari Madrasah

e. Sanksi

No.	Akumulasi Skor	Bentuk Sanksi
1.	2-9	- Peringatan Lisan
2.	10-19	- Menghadap wali kelas untuk mendapatkan peringatan/bimbingan
3.	20-29	- Membersihkan lingkungan madrasah - Membaca/menulis ayat-ayat Al-Qur'an/doa - Membuat surat pernyataan
4.	30-39	- Membersihkan lingkungan madrasah selama 2 hari - Menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an (minimal 2 surat pendek) atau doa - Membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua
5.	40-49	- Panggilan orang tua/wali murid - Membersihkan lingkungan madrasah selama 4 hari. - Menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an (minimal 4 surat pendek) dan doa
6.	50-...	- Ditentukan melalui rapat (konferensi kasus)

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Kedisiplinan adalah kualitas inti dari tanggung jawab pribadi. Perilaku disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Namun, pada kenyataannya banyak siswa yang masih melanggar peraturan sekolah. Jenis pelanggaran yang dilakukan siswa sangat bermacam-macam, pada akhirnya MIN 3 Ponorogo menerapkan sebuah kebijakan dalam bentuk sistem poin pelanggaran. Dengan adanya penerapan kebijakan sistem poin ini, siswa mampu memahami pentingnya kedisiplinan dengan penuh tanggung jawab atas konsekuensi yang diterima apabila melakukan kesalahan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV sebagai berikut.

“Sistem poin ini berlatar belakang dari sebuah keinginan dari pihak sekolah yang menginginkan siswanya tertib dan disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Jadi gini mbak, sistem poin ini dirancang untuk mendisiplinkan siswa dikarenakan kondisi siswa MIN 3 Ponorogo dalam mematuhi peraturan sekolah masih kurang.”⁹

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nur Hamid S.Pd.I. selaku kepala sekolah yaitu sebagai berikut.

“Latar belakang yang paling utama diterapkan kebijakan ini adalah ingin memberikan konsekuensi yang jelas tanpa kekerasan fisik atas perilaku yang tidak pantas yang dilakukan, supaya siswa belajar dari kesalahannya mbak. Oleh karena itu, sekolah pada akhirnya membuat kebijakan berupa penerapan sistem poin pelanggaran untuk mendisiplinkan seluruh siswa MIN 3 Ponorogo. Sistem poin ini dimulai sejak tahun 2020 hingga terlaksana sampai sekarang.”¹⁰

⁹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

¹⁰ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin pelanggaran berawal dari banyaknya siswa yang kurang disiplin dan masih melanggar peraturan sekolah.

Sistem poin pelanggaran merupakan sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat jenis-jenis pelanggaran dan jumlah skor poin bagi siswa yang melanggar peraturan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan sebagai berikut.

“Pengertian dari sistem poin pelanggaran ini adalah sebuah tata tertib yang ada di sekolah, dengan berbentuk lembaran buku yang di dalamnya terdapat jumlah poin pelanggaran yang ada. Jadi sistem poin pelanggaran ini adalah sebuah kebijakan yang digunakan sekolah untuk mengelola perilaku siswa serta memberikan konsekuensi berupa konsekuensi non fisik kepada siswa yang melanggar aturan.”¹¹

Kemudian Bapak Nur Hamid, S.Pd.I., selaku kepala sekolah menambahkan pendapatnya sebagai berikut.

“Sistem poin pelanggaran ini merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa mbak. Skor poin yang diberikan kepada siswa berbeda-beda tergantung ringan, beratnya pelanggaran yang dilakukan.”¹²

Selanjutnya, disampaikan oleh Muhammad Hanan ‘Ainur Ramadhan siswa kelas IV mengenai sistem poin pelanggaran, sebagai berikut.

“Menurut saya sistem poin pelanggaran ini adalah sebuah aturan sekolah yang di dalamnya ada berbagai jenis jumlah poin apabila ada siswa yang melanggar. Sistem poin diterapkan guna mendisiplinkan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.”¹³

¹¹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

¹² Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

¹³ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 02/W/8-02/2024.

Kemudian, disampaikan oleh Aqila Muflihatul Hafizhah siswi kelas IV sebagai berikut.

“Menurut saya sistem poin pelanggaran merupakan sistem yang digunakan oleh sekolah untuk memberikan poin yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jadi, begini mbak semisal saya terlambat datang ke sekolah saya akan mendapatkan jumlah poin sesuai yang ada dibuku catatan poin.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah dijelaskan terkait pengertian dari kebijakan sistem poin pelanggaran yang diterapkan sekolah. Bahwa sistem poin ini adalah sebuah kebijakan yang dijalankan dengan memberikan sejumlah poin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa serta memberikan konsekuensi berupa hukuman non fisik kepada siswa. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa ada banyak jenisnya dan jumlah poin yang berbeda.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan mengatakan sebagai berikut.

“Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa itu bermacam-macam mbak, diantaranya yaitu tidak membawa buku pelajaran, tidak memakai atribut yang tidak lengkap, berkata kotor, datang terlambat, berkelahi dengan kelas lain biasanya kelas rendah, makan dan minum dengan berdiri, dan tidak mengerjakan PR. Dari sekian banyaknya pelanggaran tersebut, jumlah poin yang diberikan juga berbeda-beda mbak, tergantung dari berat ringanya pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran berat seperti merokok, merubah nilai, judi. Alhamdulillah tidak ada. Siswa semakin disiplin dan mematuhi peraturan yang ada.”¹⁵

Kemudian disampaikan oleh Muhammad Hanan ‘Ainur Ramadhan siswa kelas IV mengenai jenis pelanggaran yang pernah dilakukan serta penghargaan yang didapatkan, mengungkapkan sebagai berikut.

“Pelanggaran yang sering saya lakukan dan teman-teman biasanya makan dan minum dengan berdiri, dan tidak menggunakan atribut yang lengkap saat upacara mbak. Pelanggaran yang pernah saya lakukan di dalam kelas yaitu tidak mengerjakan

¹⁴ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 03/W/8-02/2024.

¹⁵ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

matematika mbak, pada saat itu saya lupa bahwa ada PR. Akhirnya, pada saat tiba di sekolah teman-teman semua mengumpulkan tugas, saya tidak mengerjakannya dan mendapatkan poin dari pak guru. Dari kejadian tersebut, saya takut apabila dapat poin lagi mbak. Jadi, setiap ada tugas dari sekolah, malamnya selalu saya kerjakan. Untuk poin penghargaan yang saya dapatkan yaitu menjadi ketua kelas mbak.”¹⁶

Selanjutnya ditambahkan oleh Keenar Adhisti Pinasthika siswi kelas IV, mengatakan sebagai berikut.

“Pelanggaran yang sering saya lakukan yaitu makan dan minum dengan berdiri, dan tidak memakai kaos kaki mbak. Jadi saya mendapatkan poin pelanggaran. Untuk penghargaan yang pernah saya terima yaitu saya pernah mengikuti lomba mewarnai tingkat Kabupaten.”¹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat siswa yang tidak mengerjakan PR.¹⁸ Beberapa siswa masih kurang disiplin yaitu belum menggunakan atribut yang lengkap saat upacara bendera, ada yang tidak menggunakan topi dan dasi.¹⁹ Beberapa siswa juga masih makan dan minum dengan berdiri.²⁰ Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh seluruh siswa, hanya terdapat beberapa yang tidak disiplin dalam mematuhi peraturan.

Berikut ini adalah dokumentasi beberapa siswa yang melanggar peraturan di sekolah.



Gambar 4.1 Siswa Memakai Atribut Tidak Lengkap



Gambar 4.2 Siswa Makan dengan Berdiri

¹⁶ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 02/W/8-02/2024.

¹⁷ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 05/W/8-02/2024.

¹⁸ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 01/O/8-02/2024.

¹⁹ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 02/O/12-02/2024.

²⁰ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 03/O/15-02/2024.

Kedisiplinan sangat penting dimiliki oleh siswa sejak dini mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa pelanggaran yang masih dilakukan oleh siswa. Namun, sekolah tetap memberikan dukungan yang positif kepada siswa serta bimbingan supaya kedisiplinan siswa semakin bertambah.

Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan yaitu sebagai berikut.

“Kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa dimulai dari seluruh siswa diberikan buku catatan poin yang berisi aturan pedoman yang jelas mengenai jenis pelanggaran dan jumlah poin yang diberikan untuk setiap pelanggaran, serta konsekuensi yang akan dikenakan oleh siswa jika melanggar peraturan. Selain memberikan pemahaman kepada siswa sekolah juga memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa mbak. Jadi, pada saat pertemuan awal siswa kelas I dilaksanakan sosialisasi dengan wali murid serta pemahaman terkait kebijakan sistem poin ini. Penjelasan kepada wali murid ini bertujuan agar kebijakan sistem poin terlaksana dengan baik dan diharapkan wali murid mampu mendukung kedisiplinan siswa di rumah. Terkait kedisiplinan bapak ibu guru di sekolah selalu memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik kepada siswa mbak, seperti berkata dengan sopan, berbahasa yang baik, serta menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan nasehat, motivasi dan kegiatan yang positif seperti melakukan pembiasaan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Setiap pagi siswa dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek, asmaul husna, hadist, dan melakukan sholat dhuha dan dzuhur secara berjamaah di sekolah. Selanjutnya apabila siswa melanggar peraturan yang ada di sekolah beberapa kali dan sudah mencapai target poin maka siswa akan diberikan konsekuensi hukuman non fisik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila pelanggaran yang dilakukan sangat berat maka orang tua siswa akan dipanggil untuk datang ke sekolah.”²¹

Kemudian, ditambahkan penjelasan oleh bapak kepala sekolah yaitu Bapak Nur Hamid, S.Pd.I. mengatakan sebagai berikut.

“Jadi gini mbak. Pemberian pedoman aturan mengenai jenis pelanggaran dan jumlah poin disampaikan kepada seluruh siswa oleh wali kelas masing-masing. Selain itu, dua minggu sekali saya selaku kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh warga sekolah mbak, dimana disampaikan pada saat upacara bendera dan pada saat rapat evaluasi dengan seluruh guru. Apabila siswa sudah melakukan pelanggaran beberapa kali pihak sekolah akan memanggil orang tua untuk datang ke sekolah. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman proses pelaksanaan yang efektif sekolah harus melakukan komunikasi terbuka, penegakan aturan yang konsisten, dan guru memberikan contoh yang positif kepada seluruh siswa. Siswa harus mengikuti dan

²¹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Sosialisasi dengan wali murid juga di adakan setiap pertemuan wali siswa. Selain itu, kami juga mengadakan pembiasaan setiap pagi menghafal surat dan do'a-do'a supaya hal positif dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa meningkat. Siswa juga diberikan dukungan dengan berbagai pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat mereka. Apabila siswa melanggar guru wajib menegurnya dan memberikan konsekuensi apabila melampaui batas poin yang sudah ditentukan.”²²

Disampaikan pada hasil wawancara dengan Adibah Shafa Annazhirah siswi kelas IV terkait pemahaman mengenai peraturan, sebagai berikut sebagai berikut.

“Saya memahami peraturan sistem poin yang diterapkan sekolah bahwa apabila saya tidak disiplin mengikuti aturan yang ada saya akan mendapatkan poin mbak. Jadi, mulai dari kelas I dulu, bapak ibu guru selalu mengingatkan dan memberi teguran apabila melanggar peraturan sekolah.”²³

Kemudian dipertegas oleh Keenar Adhisti Pinasthika siswi kelas IV, mengatakan sebagai berikut.

“Pemahaman saya mengenai sistem poin pelanggaran ini yaitu untuk mendisiplinkan siswa mbak. Kami biasanya setiap pagi sebelum pembelajaran berlangsung kami melakukan pembiasaan membaca dan menghafal surat-surat pendek, asmaul husna, hadist dan sholat berjamaah. Selain itu, kami juga diberi motivasi dan evaluasi terkait pelanggaran yang sudah kami lakukan. Jadi pemahaman saya dan teman-teman terkait kedisiplinan dalam mematuhi peraturan juga bertambah. Sebab terkadang merasa takut apabila mendapat poin yang banyak.”²⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan. Dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa peneliti melakukan observasi di dalam kelas bahwa seluruh siswa melakukan pembiasaan setiap pagi dengan membaca dan menghafal surat-surat pendek dan do'a-do'a, selain itu juga dilanjutkan sholat dhuha berjamaah. Peneliti juga melakukan observasi pada saat upacara bendera dan bapak kepala

²² Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

²³ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 04/W/8-02/2024.

²⁴ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 05/W/8-02/2024.

sekolah juga menyampaikan evaluasi terkait peraturan sistem poin yang dijalankan di MIN 3 Ponorogo.²⁵

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penerapan sistem poin ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah mengenai kebijakan sistem poin pelanggaran yang sudah ditetapkan dengan memberikan contoh yang baik, melakukan kegiatan yang positif seperti pembiasaan membaca dan menghafal surat-surat pendek, doa-doa, asmaul husna, sholat berjamaah dan memberikan teguran serta konsekuensi kepada siswa apabila tidak disiplin. Dengan adanya penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran ini diharapkan mampu menjadikan siswa lebih disiplin dalam proses pembelajaran di sekolah.

2. Hasil dari Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seluruh siswa. Kedisiplinan siswa di sekolah mencakup beberapa perilaku yang harus dilakukan yaitu berupa kewajiban dan perilaku yang harus dihindari. Pemahaman terkait kedisiplinan perlu ditingkatkan lagi, oleh sebab itu sekolah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah.

²⁵ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 01/O/8-02/2024.

Penerapan sistem poin ini adalah kebijakan yang digunakan oleh sekolah untuk meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan adanya penerapan sistem poin pelanggaran siswa lebih disiplin dan berhati-hati dalam bertindak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV mengatakan sebagai berikut.

“Penerapan peraturan sistem poin pelanggaran ini sangat efektif diterapkan mbak, sebab adanya peraturan sistem poin ini siswa lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai pelajar, yang dulunya sering datang terlambat, Alhamdulillah sekarang sudah berangkat dengan tepat waktu. Meskipun masih ada beberapa siswa yang masih melanggar peraturan entah itu dari faktor dari dirinya sendiri maupun dari luar, setidaknya dengan adanya peraturan ini membantu pihak sekolah dalam mencegah perilaku siswa yang tidak diinginkan.”²⁶

Selanjutnya, diperjelas oleh Bapak Nur Hamid S.Pd.I. selaku kepala sekolah, mengatakan sebagai berikut.

“Penerapan peraturan sistem poin ini 80% sudah sangat baik mbak. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa sudah berangkat secara tepat waktu, sudah jarang ada yang berkata kotor dan berkelahi. Sangat efektif diterapkan di Madrasah, sebab siswa sudah dibiasakan untuk selalu disiplin sejak kecil. Siswa diberikan arahan terkait jenis pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah perilaku buruk yang tidak diinginkan.”²⁷

Kemudian, disampaikan oleh Adibah Shafa Annazhirah siswi kelas IV, mengatakan sebagai berikut.

“Menurut saya, peraturan sistem poin ini sudah efektif diterapkan mbak. Saya yang dulunya kurang disiplin dalam mematuhi peraturan seperti datang terlambat ke sekolah, sekarang bisa lebih disiplin lagi dan takut untuk mengulangi kesalahan yang sama.”²⁸

Pendapat selanjutnya, disampaikan oleh Muhammad Hanan ‘Ainur Ramadhan siswa kelas IV, mengatakan sebagai berikut.

“Menurut saya, peraturan sistem poin ini sudah efektif dan pantas untuk diterapkan selamanya mbak, karena saya sendiri merasakan bahwa takut apabila melanggar

²⁶ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

²⁷ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

²⁸ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 04/W/8-02/2024.

peraturan dan mendapatkan poin pelanggaran. Teman-teman yang biasanya berkelahi, mengganggu teman yang lain belajar apabila diingatkan mendapat poin juga takut mbak. Jadi, sistem poin peraturan yang diterapkan sekolah dengan model diberikan poin ini sangat efektif untuk mendisiplinkan siswa.”²⁹

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kedisiplinan pada saat berangkat sekolah semakin bertambah, siswa datang tepat waktu dan tidak ada yang datang terlambat. Selain itu dibuktikan pada waktu peneliti melaksanakan magang 2 di MIN 3 Ponorogo seluruh siswa tidak pernah ada yang terlambat. Sistem poin pelanggaran ini efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dijelaskan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran ini sudah efektif dijalankan di sekolah. Siswa akan memahami mengenai kedisiplinan sejak mereka kelas I. Peraturan sistem poin pelanggaran ini efektif mencegah perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh siswa.

Kemudian, peraturan yang ada di sistem poin berupa hukuman dan penghargaan mampu dijadikan motivasi dan semangat untuk menumbuhkan kedisiplinan bagi seluruh siswa.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sufyan Alumudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV mengatakan sebagai berikut.

“Terkait hukuman dan penghargaan dengan diterapkannya sistem poin pelanggaran ini sangat berdampak baik bagi seluruh siswa mbak. Siswa diberikan hukuman/konsekuensi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Siswa memahami terkait sanksi yang sudah diberlakukan oleh sekolah. Kegiatan proses pencatatan poin tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi dilakukan oleh teman

²⁹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 02/W/8-02/2024.

³⁰ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 03/O/15-02/2024.

sekelas bagi peserta didik yang melanggar. Siswa mencatat siapapun yang melanggar seperti makan dan minum dengan berdiri dan nanti dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi, di dalam buku catatan poin sudah ada jenis pelanggaran, jumlah poin, dan sanksi non fisik yang diberikan. Selain hukuman, bagi siswa yang mencapai poin penghargaan minimal 50 dalam satu tahun (setelah dikurangi poin pelanggaran), akan mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah mbak. peraturan ini sangat mendidik siswa untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan memberikan motivasi supaya selalu disiplin dalam hal apapun.”³¹

Kemudian disampaikan oleh Bapak Nur Hamid S.Pd.I. selaku kepala sekolah, mengatakan sebagai berikut.

“Hukuman dan penghargaan yang ada dalam sistem poin ini mampu dipahami siswa dengan baik diman kedisiplinan siswa semakin meningkat dan bertindak sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh sekolah mbak. Hukuman/konsekuensi dan penghargaan yang diberikan sekolah kepada siswa mampu mengontrol perilaku siswa mbak, mereka menyadari bahwa tindakan positif yang mereka lakukan akan dihargai, sedangkan pelanggaran yang mereka lakukan akan mendapatkan suatu konsekuensi.”³²

Kutipan di atas menjelaskan bahwa hasil dari penerapan hukuman dan penghargaan sistem poin pelanggaran ini sangat baik dalam mendisiplinkan siswa, sebab siswa mampu bertindak dan berperilaku baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Aqila Muflihatul Hafizhah siswi kelas IV, mengatakan sebagai berikut.

“Hukuman yang pernah saya terima dan teman-teman yaitu membersihkan lingkungan sekolah, menulis ayat Al-Qur’an mbak dan membuat surat pernyataan. Biasanya pak Sufyan menjumlah seluruh poin kami apabila sudah mencapai poin, kami mendapatkan sanksi tersebut. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama mbak, karena capek menyapu. Untuk itu, saya lebih semangat menjadi pengurus kelas mbak, karena mendapat poin penghargaan.”³³

Kemudian, disampaikan oleh Muhammad Hanan ‘Ainur Ramadhan siswa kelas IV mengatakan sebagai berikut.

“Hukuman yang sudah saya terima yaitu sama seperti yang disampaikan Aqila mbak. Tetapi kalo saya penghargaan yang diterima selain menjadi pengurus kelas, saya juga menang juara 1 Tahfiz Al-Qur’an. Jadi, saya mendapatkan piagam penghargaan dan

³¹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

³² Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

³³ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 03/W/8-02/2024.

piala. Saya biasanya dulu sering telat karena bangun kesiangan mbak, sekarang sudah tidak pernah saya ulangi lagi.”³⁴

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat terkait konsekuensi yang diterima oleh beberapa siswa yang melakukan pelanggaran. Terdapat siswa yang sudah mencapai poin 24 poin. Pada akhirnya siswa menerima konsekuensi berupa menulis ayat-ayat Al-Quran sesuai yang diperintahkan oleh guru.³⁵ Pihak sekolah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran ini sangat memudahkan guru dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi, penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran adil serta tidak berat sebelah.

Berikut ini adalah dokumentasi catatan skor poin siswa dan akumulasi skor bentuk sanksi yang diberikan.

PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN

Nama Siswa : ...A.B.A.123..... No Absen : ...8.....

NO URUT	TANGGAL	PENGHARGAAN		PELANGGARAN		PARAF	
		Nomor	Skor	Nomor	Skor	Siswa	Wali KIS
1	8-8-23			22	2		✓
2	9-8-23			31	2		
3	10-8-23			31	2		
4	10-8-23			6	2		
5	10-8-23			6	2		
6	12-8-23			3	2		
7	29-8-23			4	4		
8	29-10-23			26	2		
9	22-1-24			7	1		
10				35	2		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Gambar 4.3 Catatan Skor Poin Siswa

³⁴ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 05/W/8-02/2024.

³⁵ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 02/O/12-02/2024.

No.	Akumulasi Skor	Bentuk Sanksi
1.	2-9	- Peringatan Lisan
2.	10-19	- Menghadap wali kelas untuk mendapatkan peringatan/bimbingan
3.	20-29	- Membersihkan lingkungan madrasah - Membaca/menulis ayat-ayat Al-Qur'an/doa - Membuat surat pernyataan

Tabel 4.5 Akumulasi Skor Poin dan Bentuk Sanksi

Selanjutnya terkait penjelasan mengenai peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi sebagaimana wawancara dengan bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV mengatakan sebagai berikut.

“Alhamdulillah peraturan sistem poin pelanggaran ini sudah cukup dijalankan dengan konsisten mbak, hukuman dan penghargaan sudah diberikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kami pihak sekolah selalu mengadakan evaluasi dan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Namun, untuk konsistensi dari bapak ibu guru sendiri masih kurang mbak, terkadang beberapa guru masih belum menjalankan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa guru lupa untuk mencatat siswa yang melanggar, karena kesibukan masing-masing dari bapak ibu guru. Pihak sekolah sudah melakukan semaksimal mungkin dengan mensosialisasikan kepada seluruh bapak ibu guru terkait tanggung jawab masing-masing. Jadi, pihak sekolah tidak dapat memaksa bapak ibu guru terhadap tanggung jawab tersebut. Yang jelas sistem poin ini sudah disepakati serta sudah dijalankan dengan baik. Contohnya, ada siswa yang makan dan minum dengan berdiri, namun dibiarkan tidak diberikan poin pelanggaran. Siswa mungkin merasa bingung dan merasa tidak adil apabila tidak diterapkan secara konsisten, dikarenakan kelalaian wali kelas masing-masing yang belum mencatat siswa yang melanggar peraturan. Jadi, konsistensi ini masih perlu ditingkatkan lagi dalam menjalankan kebijakan penerapan sistem poin ini mbak.”³⁶

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nur Hamid S.Pd.I. selaku kepala sekolah yaitu sebagai berikut.

“Terkait peraturan yang sudah diterapkan insyaallah sudah dijalankan dengan baik. Untuk konsistensi penerapan masih kurang mbak, sebab terdapat beberapa guru yang

³⁶ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

belum konsisten menjalankan peraturan sistem poin ini. Namun, kami pihak sekolah selalu melakukan evaluasi dan bimbingan kepada bapak ibu guru supaya sistem poin ini dijalankan dengan sebaik mungkin terutama sejak kelas I, supaya siswa terbiasa disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah.”³⁷

Oleh karena itu, guru yang mengajar di kelas harus benar-benar melaksanakan kebijakan ini dengan baik seperti konsisten mengingatkan siswa apabila melanggar dan memberikan poin sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan proses pencatatan poin tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi dilakukan oleh teman sekelas bagi peserta didik yang melanggar. Siswa mencatat siapapun yang melanggar seperti makan dan minum dengan berdiri dan nanti dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Dan apabila siswa sudah melakukan kesalahan beberapa kali dan sudah mencapai target poin maka siswa akan diberikan konsekuensi supaya jera.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan sistem poin pelanggaran pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Faktor yang mempengaruhi siswa tidak disiplin bisa dari beberapa faktor. Faktor tersebut bisa dari siswa sendiri maupun dari luar.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan yaitu sebagai berikut.

“Untuk faktor pendukung berjalannya kebijakan ini yang paling utama adalah dukungan dari seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Dimana keterlibatan aktif seluruh komponen ini, alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan ini yaitu pertama berdasarkan faktor internal dari diri siswa sendiri, terdapat siswa yang belum memiliki kemauan untuk mentaati peraturan, mereka sering menyepelekan aturan yang ada, seperti contohnya sering tidak mengerjakan PR, tidak menggunakan atribut. Sedangkan faktor eksternal ada beberapa siswa yang dari orang tuanya sendiri kurang mendukung anaknya, ada yang tidak memperhatikan terkait seragam yang digunakan siswa. Faktor penghambat dari lingkungan sekolah terdapat siswa yang berperilaku kurang baik sehingga siswa

³⁷ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

cenderung meniru perilaku tersebut dan sebagian guru masih belum konsisten, dimana beberapa guru tidak mencatat siswanya yang melanggar peraturan sekolah. Jadi semisal kelas A baik kelas B belum tentu baik dari segi kedisiplinanya.”³⁸

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nur Hamid S.Pd.I. selaku kepala sekolah yaitu sebagai berikut.

“Faktor pendukung dari pelaksanaan ini terutama dari Bapak Sufyan selaku Waka Kesiswaan yang berhasil menyusun kebijakan sistem poin ini dengan baik mbak. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan sistem poin ini yaitu yang pertama faktor internal berasal dari sikap siswa itu sendiri, setiap siswa pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Siswa yang terbiasa tidak hidup disiplin sejak dini, pasti akan lumayan kaget mbak. Mulai dari kelas I kami sudah menerapkan kebijakan yang harus dipahami oleh siswa dan orang tua siswa. Jadi, siswa yang mungkin pribadinya kurang disiplin harus lebih menyesuaikan untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Untuk faktor eksternalnya sendiri terutama dari orang tua mbak, meskipun sudah disosialisasikan kepada seluruh wali siswa masih ada beberapa orang tua yang belum paham terkait sistem poin ini sehingga terkadang siswa tidak mendapat dukungan dari orang tua untuk selalu mematuhi peraturan sekolah.”³⁹

Kemudian juga disampaikan oleh Aqila Muflihatul Hafizhah siswi kelas IV terkait hambatan penerapan sistem poin ini yaitu sebagai berikut.

“Ada mbak, hambatan yang saya rasakan dari penerapan sistem poin yaitu terkadang kelas kami itu sangat tertib dalam mematuhi peraturan, namun kelas lain terkadang dibiarkan. Seperti contohnya makan dan minum sambil berdiri, tidak memakai kaos kaki. Siswa tersebut tidak diberi poin oleh guru.”⁴⁰

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Keenar Adhisti Pinasthika siswi kelas IV yaitu sebagai berikut.

“Menurut saya, hambatan yang saya alami yaitu mengingatkan teman yang sering melanggar aturan mbak. Mereka diingatkan untuk tidak berantem itu sulit. Kadang malah ganti ngajak berantem. Dan apabila mereka berantem itu sangat mengganggu siswa lain yang mungkin sedang mengerjakan tugas saat istirahat, seperti itu mbak.”⁴¹

Kutipan tersebut sudah menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari penerapan sistem poin pelanggaran ini. Bahwa dalam

³⁸ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

³⁹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

⁴⁰ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 03/W/8-02/2024.

⁴¹ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 05/W/8-02/2024.

menjalankan sebuah kebijakan juga terdapat sebuah dukungan dan kendala, baik dari diri siswa sendiri, pihak sekolah, maupun dari pihak orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, sekolah melakukan berbagai cara untuk mendukung berlangsungnya penerapan sistem poin pelanggaran ini dan mengatasi hambatan dalam mendisiplinkan siswa.

Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV yaitu sebagai berikut.

“Jadi gini mbak, pihak sekolah mendukung kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran ini dengan mengembangkan kebijakan dan aturan yang jelas terkait jenis pelanggaran dan konsekuensinya. Pihak sekolah memberikan penyuluhan kepada siswa mengenai pentingnya kedisiplinan dan dampak negatif apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Sekolah juga berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait kebijakan sistem poin pelanggaran ini guna meningkatkan kedisiplinan seluruh siswa.”⁴²

Kemudian, ditambahkan penjelasan oleh Bapak Nur Hamid, S.Pd.I. selaku kepala sekolah yaitu sebagai berikut.

“Sekolah mendukung anak-anak dengan dimotivasi secara terus menerus supaya lebih baik. Sosialisasi sering disampaikan pada saat upacara bendera setiap hari Senin kepada seluruh warga sekolah, serta melakukan sosialisai dan evaluasi kepada seluruh guru dan orang tua siswa setiap pertemuan dengan wali siswa. Selain itu, sekolah juga memiliki ekstrakurikuler banyak mbak. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler siswa juga semangat apabila nanti diikutkan lomba dan apabila menang akan mendapatkan piala dan sertifikat. Siswa akan lebih disiplin dalam mengatur jadwal kegiatan belajar dan ekstrakurikuler yang mereka ikuti.”⁴³

Berdasarkan dukungan yang di sampaikan, sekolah juga melakukan cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan proses penerapan sistem poin ini.

⁴² Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

⁴³ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 06/W/12-02/2024.

Disampaikan oleh Bapak Sufyan Alimudin, S.Pd.I. selaku waka kesiswaan dan guru kelas IV yaitu sebagai berikut.

“Untuk hambatan nya sendiri mungkin terkadang dari gurunya ya mbak, jadi untuk mengatasi hal tersebut kami pihak sekolah pada saat rapat bersama dengan bapak kepala sekolah dan guru lainnya, disini kami mengomunikasikan bahwa untuk konsisten dan tegas dalam menjalankan peraturan sistem poin yang sudah disepakati dan dijalankan ini. Setiap guru apabila melihat anak didiknya melakukan hal yang kurang baik, tolong selalu diingatkan. Jadi, terkait hambatan yang terjadi disini kami selaku pihak sekolah tidak hanya langsung memberikan poin pelanggaran, tetapi juga memberikan motivasi dan pendekatan berbasis solusi terkait siswa yang sudah melanggar peraturan sampai melampaui batas. Sedangkan hambatan dari siswanya sendiri, untuk kelas bawah masih banyak yang kurang baik, terdapat siswa yang masih belum menggunakan atribut yang lengkap.”⁴⁴

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa hal yang dilakukan sekolah untuk terus mendukung proses penerapan kebijakan sistem poin ini yaitu bapak kepala sekolah melakukan sosialisasi, motivasi, serta dukungan kepada seluruh warga sekolah untuk selalu disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah, terutama kepada bapak ibu guru untuk konsisten membimbing dan mengingatkan seluruh siswa untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dengan adanya peraturan sistem poin ini siswa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan disiplin dalam hal apapun. Kedisiplinan sangat penting dimiliki oleh seluruh warga sekolah demi tercapainya kegiatan pembelajaran yang baik.⁴⁵

⁴⁴ Lampiran Transkrip Wawancara Nomor 01/W/8-02/2024.

⁴⁵ Lampiran Transkrip Observasi Nomor 04/O/19-02/2024.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Menurut John Garmo, kedisiplinan adalah kualitas inti dari tanggung jawab pribadi. Kedisiplinan diri terlihat melalui kerapian, ketepatan waktu, sikap hemat, dan lain-lain. Kedisiplinan memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang mereka tahu, mereka lakukan, dan di mana mereka menginginkan itu atau tidak.⁴⁶ Supaya siswa disiplin maka harus diberlakukan sebuah aturan, sebagaimana diterapkannya kebijakan sistem poin pelanggaran. Sistem poin adalah suatu tatanan, peraturan, undang-undang atau hukum dengan berbentuk butir (nilai yang dapat dijadikan dasar atau kegiatan dari suatu organisasi atau lembaga tertentu).⁴⁷

Keberhasilan mendisiplinkan siswa melalui penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran tentunya harus memerlukan kerjasama seluruh pihak sekolah. Berdasarkan kajian teori bab II menurut Imam Musbikin ada tiga tindakan yang dilakukan yaitu: preventif, korektif, dan progresif. Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para siswa agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering

⁴⁶ John Garmo, *Pengembangan Karakter Untuk Anak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2023), 45.

⁴⁷ Darna, *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa*. 78.

berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Disiplin progresif merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di MIN 3 Ponorogo, bahwa dalam mendisiplinkan siswa dilakukan dengan tindakan preventif, korektif, dan progresif.

Dalam tindakan preventif sekolah memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk disiplin mematuhi aturan. Seluruh siswa diberi pemahaman mulai dari kelas I tentang jenis pelanggaran dan jumlah poin apabila melanggar aturan. Selain itu, pihak sekolah juga mensosialisasikan kepada wali murid supaya tidak terjadi salah paham dalam menjalankan kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran ini. Bapak ibu guru di sekolah selalu memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik kepada siswa, seperti berkata dengan sopan, berbahasa yang baik, serta menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan nasehat, motivasi dan kegiatan yang positif seperti melakukan pembiasaan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Setiap pagi siswa dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek, asmaul husna, hadist, dan melakukan sholat dhuha dan dzuhur secara berjamaah di sekolah. Kemudian, tindakan korektif pihak sekolah mencatat siswa yang melanggar dibuku catatan poin dan memberikan hukuman/konsekuensi apabila sudah mencapai jumlah poin yang sudah ditentukan. Kegiatan ini berguna

⁴⁸ Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Disiplin*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2021),12.

membuat efek jera kepada siswa apabila melakukan kesalahan dan tidak akan diulang dikemudian hari. Yang terakhir melalui tindakan progresif pihak sekolah memberikan teguran kepada siswa yang melanggar aturan, memberikan konsekuensi yang lebih apabila sudah melampaui batas serta memanggil orang tua datang ke sekolah apabila siswa melakukan pelanggaran berulang kali.

Dari paparan tersebut dapat dianalisis terkait proses pelaksanaan penerapan sistem poin ini bahwa penerapan sistem poin pelanggaran ini sudah dilaksanakan dengan baik. Mulai dari memberikan pemahaman, sosialisasi, mencatat siswa yang melanggar aturan, memberikan konsekuensi, dan memberikan teguran kepada siswa.

2. Hasil dari Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Kedisiplinan siswa di sekolah mencakup beberapa perilaku yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu berupa kewajiban dan perilaku yang harus dihindari. MIN 3 Ponorogo dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa menerapkan sebuah kebijakan yaitu sistem poin. Menurut Erwin Susanto, sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran. Pemberian poin yang diberikan beragam, Bergantung seberapa berat

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Tujuan sistem poin ini adalah untuk membuat peserta didik menjadi lebih rajin pada kegiatan sekolah dan agar siswa taat pada aturan dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah.⁴⁹ Kebijakan sistem poin pelanggaran yang dilaksanakan di MIN 3 Ponorogo sudah dijalankan dengan baik dan sangat efektif dalam mendisiplinkan siswa. Siswa memahami aturan yang diterapkan sekolah dengan baik dan siswa mampu mengontrol perilaku sendiri, bahwa mereka menyadari tindakan positif yang mereka lakukan akan dihargai, sedangkan pelanggaran yang mereka lakukan akan mendapatkan suatu konsekuensi.

Menurut Elizabeth Hurlock dalam Susanto mengungkapkan beberapa indikator penting dalam disiplin, yaitu: peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Peraturan merupakan pola yang diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Peraturan yang efektif mampu membantu seorang siswa merasa terlindungi sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Penghargaan artinya setiap bentuk imbalan, yakni suatu hasil yang baik. Hukuman merupakan menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena telah melakukan suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran yang dilakukan. Konsistensi menggambarkan tingkat keseragaman, kestabilan, atau kecenderungan menuju kesamaan.⁵⁰ Siswa MIN 3 Ponorogo mampu memahami hal-hal tersebut dengan baik. Terkait peraturan siswa sudah

⁴⁹ Erwin Susanto, "Manajemen Sistem Poin Dalam Membina Kedisiplinan Siswa", *Manajer Pendidikan* 9, no. 3 (2015): 371.

⁵⁰ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

memahami bahwa sekolah menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran untuk mendisiplinkan perilaku yang dilakukan oleh siswa. Siswa memahami mengenai jenis-jenis peraturan dan jumlah skor poin pada buku catatan poin dan sudah berjalan secara efektif dalam mendisiplinkan siswa. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan dipahami apabila siswa melanggar aturan yang sudah ada pada buku catatan poin siswa akan mendapatkan poin dan apabila melampaui batas maka akan mendapatkan konsekuensi non fisik sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat siswa sudah mencapai 24 poin, sehingga siswa tersebut menerima konsekuensi berupa menulis ayat-ayat Al-Qur'an sesuai yang diperintahkan oleh guru. Penghargaan diberikan kepada siswa yang disiplin menjadi pengurus kelas atau juara dalam kegiatan perlombaan dengan diberikan pujian dan penghargaan berupa sertifikat. Hal tersebut sudah di catat oleh wali kelas masing-masing bagi siapapun siswa yang berprestasi. Kemudian prestasi juara 1 Tahfiz Al-Qur'an yang sudah didapatkan oleh Muhammad Hanan yaitu mendapatkan piagam penghargaan dan piala, selain itu dia juga mendapatkan sertifikat menjadi pengurus kelas. Selanjutnya, konsistensi kedisiplinan dari penerapan sistem poin ini masih kurang baik, dikarenakan terdapat beberapa guru yang masih belum konsisten dalam menegur dan mencatat anak-anaknya apabila melanggar aturan.

Dari paparan tersebut dapat dianalisis bahwa kebijakan sistem poin dalam mendisiplinkan siswa di MIN 3 Ponorogo sudah sesuai dengan beberapa

indikator yang terdapat pada teori bab II. Siswa mampu memahami terkait peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi dari penerapan ini. Namun indikator yang terakhir yaitu konsistensi, mungkin pihak sekolah dapat lebih memaksimalkan proses kebijakan ini dengan sebaik mungkin. Sebab, siswa sangat antusias dan terdapat banyak perubahan sejak diterapkannya penerapan sistem poin pelanggaran ini.

Siswa dan pihak sekolah menyampaikan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran ini sudah sangat efektif diterapkan dan mampu mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan yaitu makan dan minum dengan berdiri, tidak membawa buku pelajaran, tidak memakai atribut yang tidak lengkap, datang terlambat, berkelahi dengan kelas lain biasanya kelas rendah, dan tidak mengerjakan PR. Siswa diberikan jumlah poin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang didapatkan. Siswa yang dulunya sering melakukan pelanggaran sekolah dengan diterapkannya sistem poin pelanggaran ini akan jera. Kedisiplinan siswa meningkat dan kegiatan pembelajaran mampu berjalan dengan sebaik mungkin.

Dari paparan yang sudah dijelaskan tersebut, bahwa penerapan sistem poin sudah efektif untuk mendisiplinkan siswa. Pelanggaran yang dilakukan siswa berkurang, namun konsistensi dari bapak ibu guru perlu ditingkatkan lagi demi tercapainya siswa yang patuh akan peraturan yang ada dan diharapkan dari siswanya sendiri untuk selalu mematuhi peraturan yang sudah diterapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik MIN 3 Ponorogo

Nicholas Mamonto, et al., mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan seseorang ada dua yaitu berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kemauan, motivasi, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan individu, seperti keluarga, lingkungan sekolah, dan pengaruh media sosial.⁵¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa di MIN 3 Ponorogo yaitu untuk faktor pendukungnya sendiri berasal dari dukungan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa yang menerima dan menjalankan kebijakan ini dengan baik. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa adalah dari siswa itu sendiri. Terdapat siswa yang belum memiliki kemauan untuk mentaati peraturan dan menyepelekan aturan. Contohnya yaitu sering tidak mengerjakan PR, dan tidak menggunakan atribut yang lengkap saat upacara bendera. Faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa yaitu terdapat beberapa siswa yang dari orang tuanya sendiri kurang mendukung anaknya, ada yang tidak memperhatikan terkait seragam yang digunakan oleh anaknya. Faktor eksternal lainnya yaitu dari lingkungan sekolah sendiri terdapat siswa yang berperilaku kurang baik sehingga siswa

⁵¹ Nicholas Mamonto, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, *Disiplin dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 53.

cenderung meniru perilaku tersebut dan sebagian guru masih ada yang belum konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Terdapat beberapa guru yang tidak mencatat siswanya saat melanggar peraturan sekolah. Hal tersebut dikarenakan beberapa guru lupa untuk mencatat, karena kesibukan masing-masing. Pihak sekolah sudah melakukan semaksimal mungkin dengan mensosialisasikan kepada seluruh bapak ibu guru terkait tanggung jawab masing-masing. Jadi, pihak sekolah tidak dapat memaksa bapak ibu guru terhadap tanggung jawab tersebut. Yang jelas sistem poin ini sudah disepakati oleh seluruh pihak sekolah serta sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan cara sekolah mengatasi berbagai masalah yang terjadi yaitu anak-anak diberikan motivasi secara terus menerus dan mendukung kegiatan positif yang siswa lakukan. Kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh sekolah yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan membaca ayat al-qur'an, melaksanakan sholat berjamaah dan memberikan teguran apabila melakukan kesalahan serta memberikan penghargaan atas upaya yang sudah dilakukan oleh siswa. Sekolah memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa serta mengomunikasikan kepada seluruh bapak ibu guru untuk konsisten mengingatkan dan menegur anak-anaknya apabila melakukan kesalahan.

Dari paparan tersebut sudah dijelaskan dan dapat dianalisis bahwa dalam menjalankan sebuah kebijakan pasti terdapat faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang terjadi. Apabila diberi dukungan dan motivasi siswa akan mampu merubah dirinya sendiri tanpa ada

paksaan serta konsistensi dari bapak ibu guru harus ditingkatkan lagi demi tercapainya kedisiplinan yang optimal. Kedisiplinan sangat penting dimiliki oleh seseorang, dengan terbiasa disiplin siswa akan memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo dilaksanakan dengan memberikan contoh yang baik, melakukan kegiatan yang positif seperti pembiasaan membaca dan menghafal surat-surat pendek, do'a-do'a, asmaul husna, dan sholat berjamaah.
2. Hasil dari penerapan sistem poin pelanggaran ini efektif dalam mendisiplinkan siswa serta mencegah perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh siswa. Hukuman/konsekuensi dan penghargaan yang diberikan sekolah kepada siswa mampu mengontrol perilaku siswa, mereka menyadari bahwa tindakan positif yang mereka lakukan akan dihargai, sedangkan pelanggaran yang mereka lakukan akan mendapatkan suatu konsekuensi.
3. Faktor pendukung penerapan sistem poin pelanggaran dalam menumbuhkan kedisiplinan peserta didik MIN 3 Ponorogo yaitu adanya dukungan dari seluruh warga sekolah, orang tua siswa, waka kesiswaan, dan bapak kepala sekolah yang selalu memberikan evaluasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan sistem poin pelanggaran ini. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi yaitu faktor internal berasal dari diri siswa sendiri, terdapat siswa yang belum memiliki kemauan untuk mentaati peraturan, sering menyepelekan aturan yang

ada, tidak mengerjakan PR, tidak menggunakan atribut. Sedangkan faktor eksternal ada beberapa siswa yang dari orang tuanya sendiri kurang mendukung anaknya, ada yang tidak memperhatikan terkait seragam yang digunakan siswa. Faktor penghambat dari lingkungan sekolah sendiri terutama kepada bapak ibu guru untuk konsisten membimbing dan mengingatkan seluruh siswa untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dengan adanya peraturan sistem poin ini siswa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan disiplin dalam hal apapun. Kedisiplinan sangat penting dimiliki oleh seluruh warga sekolah demi tercapainya kegiatan pembelajaran yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di MIN 3 Ponorogo, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Guru

Sebagai panutan bagi seluruh siswa di sekolah, diharapkan seluruh bapak ibu guru lebih intens dan konsisten dalam menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran ini. Supaya dijadikan motivasi kedisiplinan siswa untuk berperilaku perilaku yang positif.

2. Bagi Siswa

Adanya kebijakan penerapan sistem poin pelanggaran ini kepada seluruh siswa MIN 3 Ponorogo untuk lebih memahami terkait aturan yang sudah ditetapkan, diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi, serta disiplin dan tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Dakhi, Agustin Sukses. *Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2020.
- Darna, I Wayan. *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa*. Bandung: Nilacakra, 2023.
- Fauni, Mayang Mirna Dwi. "Penerapan Tata Tertib Sistem Poin untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta." IIQ Jakarta, 2020.
- Garmo, John. *Pengembangan Karakter Untuk Anak*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hasbullah, H. M. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hill, Napoleon. *The Master Key to Riches Pembuka Pintu-Pintu Kekayaan dan Kebahagiaan*. Jakarta Selatan: PT. Cahaya Intan Suci, 2008.
- Sholihah, Ilyatus. "Pengembangan Budaya Madrasah untuk Peningkatan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Putri Ganjaran Gondanglegi Malang," 2022.
- Irlan, Rohiat, dan Puspa Djuwita. "Poin Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Siswa SMA." *Manajer Pendidikan* 11, no. 4 (2017): 367–73.
- Isnaini, Faiqotul, dan Muh. Ekshan Rifai. *Strategi Self-Management untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar*. Sukoharjo: CV Sindunata, 2019.
- Jauhary, Hadziq. *Hidup Sukses Dengan Disiplin*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Khamidah, Durotul. "Peran Pengurus dalam Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Santriwati di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Kristian, Aditya. "Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja." Universitas Negeri Makassar, 2022.
- Laugi, Saidah. "Penerapan Tata Tertib Sekolah untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe." *Shautut Tarbiyah* 25, no. 2 (2019): 239.

- Mabuka, Oktovina. "Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2021): 360–72.
- Mamonto, Nicholas, Samuel Wahidin Darto Laila, Itsna Noor Pratama, I Putu D.M.P Junaedi, Achmad Tavip Saimima, M Sahrawi Khotim, Nur Wyafi'ah Gojali, Sudarno Renaldo, Nicholas. *Disiplin Dalam Pendidikan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Mega, Utami, Mukhlison Effendi, dan Mukhibat. "Analisis Nila Moral dan Manfaatnya Untuk Pembelajaran SD/MI: Penelitian Novel Anak-Anak Merapi Karya Bambang Joko Susilo." *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 7, no. 1 (2022): 60.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Mubarok, Husni, Muhammad Rizky Pratama, D Permatasari, E W Putri, dan M Rohman. "Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi Pelanggaran Siswa SD Al Ma'soem Bandung." *Pedagogia: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 3 (2021): 129–35.
- Musbikin, Imam. *Pendidikan Karakter Disiplin*. Yogyakarta: Nusa Media, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Kompas Gramedia. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ridwan. "Penerapan Hukuman untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat." *Jurnal Ilmiah Pro Guru* 4, no. April (2020): 5–24.
- Rohmah, Siti Umi. "Implementasi Sistem Monitoring Tata Tertib (Simonta) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 2018-2019." IAIN Ponorogo, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018.
- Setyawan, Dwi, Ely Setyo Astuti, dan Ekojono Ekojono. "Sistem Pencatatan Poin Pelanggaran Siswa Pada SMA Negeri 1 Purwosari." *Jurnal Informatika Polinema* 1, no. 1 (2017): 13.
- Shinta, Mutiara, dan Siti Quratul Ain. "Strategi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2021): 4045–52.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ALFABETA, 2022.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Surya, Mohammad. *Psikologi Konseling*. Jakarta: C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Susanto, Erwin. “Menejemen Sistem Poin dalam Membina Kedisiplinan Siswa.” *Manajer Pendidikan* 9, no. 3 (2015): 370–76.
- Taqiyya, Uly Inayati. “Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa pada SMAN 1 Jekulo Kudus.” Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pub. L. No. 20 (2003).
- Wiken, Purnama Sari, Ilmi Darul, M Iswantir, dan Jasmienti Jasmienti. “Pelaksanaan Kedisiplinan Siswa Melalui Sistem Poin di SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2023): 179–205.
- Wuldanari, Ipinu. “Penerapan Program Sistem Poin di SMK Negeri 2 Yogyakarta.” *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 120–27.
- Zendrato, Tri Lilin Natalia, dan Berkat Persada Lase. “Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah.” *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2022): 124–38.

